



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)



**LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2007**

Daftar Isi Contents

Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>	1
Visi dan Misi Perusahaan <i>Company Vision and Mission</i>	3
Kebijakan Mutu Perusahaan <i>Company Quality Policy</i>	4
Sambutan Dewan Komisaris <i>Commissioners Message</i>	5
Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Profile</i>	7
Sambutan Direktur Utama <i>President Director Message</i>	9
Profil Direksi <i>Board of Directors Profile</i>	12
Aktifitas Manajemen <i>Management Activities</i>	14
Klasifikasi Kapal <i>Ship Classification</i>	18
Persetujuan Gambar <i>Drawing Approval</i>	21
Aktifitas Survey Klasifikasi <i>Classification Survey Activities</i>	22
Survey Statutoria <i>Statutory Survey</i>	23

Otorisasi Statutoria <i>Statutory Authorization</i>	24
Aktifitas Penelitian & Pengembangan <i>Research & Development Activities</i>	25
Konsultasi & Supervisi <i>Consultancy & Supervision</i>	27
Pengembangan SDM <i>Human Resources Development</i>	34
Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>	35
Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance</i>	36
Pedoman Kebijakan Perusahaan <i>Corporate Policy manual</i>	40
Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility</i>	46
Kinerja Keuangan <i>Financial Performance</i>	48
Komisaris, Direksi dan Staf <i>Commissioners, Director and Staff</i>	53
Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I) <i>The Consultative Committee of Indonesian Classification</i>	54
Kerjasama <i>Cooperation</i>	55
Jaringan Bisnis <i>Business Network</i>	56
Daftar Kontak <i>List Of Contact</i>	57
Laporan Auditor Independen <i>Independent Auditors Report</i>	59

Profil Perusahaan *Company profiles*

Biro Klasifikasi Indonesia, juga dikenal sebagai BKI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan tujuan mulia untuk mendukung kemandirian industri perkapalan dan pelayaran nasional melalui pelayanan jasa klasifikasi dan jasa-jasa lainnya yang terkait. BKI dalam pelayanan jasanya melakukan riset dan mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (Rules & Regulation) dengan melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survey maritim terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknik. Rules & Regulation yang dikembangkan tidak hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, instalasi permesinan dan kelistrikan.

Lingkup kerja dari BKI adalah melaksanakan survey dan sertifikasi untuk menjamin bahwa Rules & Regulation yang telah dikembangkan, diterapkan pada saat pembangunan kapal baru dan kapal yang sudah jadi. Untuk mempertahankan kondisi kapal tersebut, maka dalam prosesnya kapal diharuskan melakukan perawatan dan perbaikan yang terjadwal, dimana pelaksanaan ini akan dimonitor terus oleh BKI dengan melakukan survey periodik dalam mempertahankan klasifikasinya.

Penilaian kondisi kapal dilakukan berdasarkan survey yang profesional dan independen oleh surveyor klasifikasi yang memiliki kompeten dalam melakukan penilaian kondisi kapal. Hasil dari pemeriksaan dan penilaian ini berupa laporan dan sertifikat yang dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Pemilik Kapal, Pihak Asuransi, Pemilik Cargo, Pencharter, Galangan Kapal, Pemerintah / Syahbandar / PSC dll.

Indonesian Classification Bureau, also is known as BKI is a State Owned Company established with a purpose to support industrial independence of national shipping industries and sea transportation through classification service and other services related. BKI in its service activities also doing research publicizes and applies technique standard (Rules & Regulation) by doing design activity, construction and maritime survey related to afloat facility, including ship. This standard compiled and released by BKI as technical publication. Rules & Regulation developed not only hull structure, but also covers safety equipments, installation of machinery and electricity.

Scopes of work of BKI is execute survey and certify to ensure that Rules & Regulation which has been developed, applied at the time of construction of new building ship and existing ship. To maintain condition of the ship, hence in process of ship is obliged to does maintenance and repair schedule, where this execution will be monitored always by BKI by doing periodic survey in maintaining its classification.

Judgement of ship condition is done based on professional and independent survey by class surveyor having competence in doing survey of ship condition. Result from this survey and assessment in the form of report and certificate taken as reference by interested parties, for example Ship owner, Insurance Company, Cargo Owner, charterer, Dockyard, The Government / Harbour master / PSC etc.



Kegiatan usaha pada awal berdirinya BKI adalah kegiatan dalam bidang klasifikasi kapal (sebagai bisnis utama) dimana usaha ini dilaksanakan secara nirlaba, namun sejalan dengan perkembangan usaha, maka saat ini selain kegiatan di atas, juga melakukan diversifikasi usaha dengan mengembangkan kegiatan bidang jasa non klasifikasi, yaitu kegiatan usaha jasa konsultasi & supervisi. Sehingga saat ini kegiatan usaha BKI ada 2 (dua) kegiatan usaha, yaitu Kegiatan Usaha Jasa Klasifikasi & Statutoria dan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi & Supervisi.

Kegiatan Usaha Jasa Klasifikasi & Statutoria mencakup:

- Pemeriksaan konstruksi kapal, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal.
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai.
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen.
- Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las lainnya.
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain.
- Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing / konsultan asing.
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.

Sedangkan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi & Supervisi mencakup :

- Jasa konsultasi & supervisi di bidang maritim dan industri serta teknik lainnya.
- Studi kelayakan di bidang teknologi maritim dan industri lainnya.
- Jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang minyak, gas dan ketenaga kerjaan.
- Rekayasa teknik dan supervisi di bidang minyak dan gas.
- Pengujian DT dan NDT.
- Konsultasi sesuai standar nasional dan internasional.
- Pelatihan keahlian di bidang teknik.
- Tank cleaning & sludge processing.
- Pencegahan korosi.

Setelah beroperasi selama 43 tahun, BKI telah mencapai keberhasilan dan kondisi sebagai berikut :

- Berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 22 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di 1 (satu) cabang di Singapore.
- Telah memiliki kerja sama dengan hampir semua badan klasifikasi asing anggota IACS.
- Menerbitkan Rules & Regulation di bidang klasifikasi kapal dan setiap tahun menerbitkan Register Kapal dan Register ISM Code & ISPS Code
- Telah mendapatkan pelimpahan tugas / wewenang dari Pemerintah Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria.
- Telah mendapat penunjukan inspeksi dan sertifikasi dari Pemerintah cq Direktorat Jenderal Migas dan Departemen Tenaga Kerja.
- Telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 : 2000 dan telah mendapatkan sertifikat mutu ISO 9001 : 2000 dari badan sertifikasi internasional.

Business activity upon BKI incorporation is an activity in ship Classification sector (as a core business) where this business is a non profit oriented, but in line with BKI business development as a company, besides the abovementioned activities, BKI also makes a business diversification in developing non classification services, namely consultancy & supervision services. So that, BKI has currently 2 business segments, namely Classification & Statutory Business Activity and Consultancy & Supervision Business Activity.

Classification and Statutory services (core businesses), shall cover :

- *Surveying of ship construction, supervising and testing as well as issuing Class Certificate and Registering Ships;*
- *Inspecting and testing floating objects and off-shore construction facility;*
- *Testing and certifying Materials and Components;*
- *Testing and issuing qualification certificates of welders, welding inspector and any other welders;*
- *Surveying and certifying in Statutory matters based on the Authorization of the Government of the Republic of Indonesia and governments of any other states;*
- *Acting as an agent and/or representing Foreign Classification/ Foreign Consultant; and*
- *Certifying in accordance with International standard.*

While, Consultancy & Supervision services shall cover:

- *Consultancy and Supervision services in Marine and industrial as well any other technical sectors;*
- *Feasibility Study in Maritime technology and any other Industrial sectors;*
- *Inspection & Certification services in Oil and Gas and Labour Sectors;*
- *Technical Engineering and Supervision in Oil and Gas sector;*
- *DT & NDT testing;*
- *Consultancy in accordance with National and International Standards;*
- *Technical public training;*
- *Tank Cleaning & sludge processing*
- *Corrosion Prevention*

After operating for 43 years, BKI has attained the following:

- *Having its Head Office in Jakarta and 22 branch offices throughout Indonesia, including Singapore;*
- *Already cooperating with almost all foreign classification bodies being members of IACS;*
- *Issuing Rules & Regulation in Ship Classification and annually issuing Ship Register, ISM Code & ISPS Code Register;*
- *Already receiving delegation of authority from the Government of Indonesia cq. Directorate General of Sea Transportation for statutory survey & certification;*
- *Already receiving inspection and certification assignment from the Government cq. Directorate General of Oil and Natural Gas and Ministry of Manpower;*
- *Already applying quality management system based on ISO 9001:2000 and receiving Quality Certificate of ISO 9001:2000 from International Certification Body;*



Visi Perusahaan

Menjadikan BKI sebagai perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas produk, kualitas sumber daya manusia dan kinerja perusahaan.

Misi Perusahaan

- Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar kapal serta fasilitas terkait lainnya.
- Pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan Baik.
- Membentuk citra perusahaan bahwa jasa BKI dibutuhkan dan menjadi standar keselamatan dan kualitas.
- Memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli kelautan nasional untuk berpartisipasi melalui pengembangan pengetahuan serta penerapannya.
- Membantu peningkatan pendapatan negara baik dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing.

Company Vision

Making BKI as a reliable and the best engineering company both from product quality, human resources quality and company's performance.

Company Mission

- *Giving priority the securing safety of life and any objects at sea as well as protecting the environment through development and inspection of ship standards and any other relevant facilities;*
- *Managing the company effectively and efficiently by applying a Good Corporate Governance;*
- *Forming corporate image that BKI services are required and serve as safety and quality standard;*
- *Giving opportunity to the national maritime experts to participate in knowledge development and application thereof; and*
- *Assisting in increasing state's revenues both in the form of Rupiah and foreign exchange.*

Sebagai perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2000, BKI memiliki komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (customer satisfaction) dan terus melakukan penyempurnaan (continuous improvement). Kebijakan Mutu Perusahaan adalah “mengutamakan pelayanan jasa bagi para pengguna jasa berdasarkan kepedulian yang tinggi terhadap masalah Keselamatan dan Mutu”.

Dalam mewujudkan komitmen tersebut, BKI memiliki Nilai-nilai Perusahaan yang diterapkan pada seluruh jajaran organisasi, meliputi :

- Moto perusahaan "TERPERCAYA", yang berarti jasa yang diberikan adalah berkualitas, dapat diandalkan, efisien, tepat waktu dan memiliki reputasi.
- Nilai-nilai perusahaan yaitu Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Pengguna Jasa, Kepemimpinan dan Penghargaan pada Karya / Prestasi Karyawan.
- Budaya Perusahaan "TERTIB" (Taqwa kepada Tuhan YME; Etos kerja yang tinggi; Reputasi yang senantiasa ditingkatkan; Tertib dalam menerapkan kebijakan manajemen dan sikap pribadi; Ilmu pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai; Baik dalam pelayanan dan hasil kerja).

Manajemen BKI menjamin :

- Persyaratan mutu berorientasi kepada standar mutu Internasional sesuai dengan ISO 9001:2000 dan pemenuhan pencapaian sasaran mutu perusahaan serta senantiasa melakukan penyempurnaan yang menerus terhadap mutu.
- Penerapan Sistem Mutu dan nilai-nilai perusahaan tersebut dalam seluruh kegiatan jasa.
- Tanggap terhadap kebutuhan pemakai jasa / masyarakat umum dan mengutamakan kepuasan pelanggan dan aspek keselamatan.
- Semua personil selalu diberi pemahaman tentang sistem mutu melalui pelatihan yang berkesinambungan serta penerapan sistem mutu di dalam semua jajaran organisasi.

Pemenuhan terhadap kebijakan, prosedur dan petunjuk kerja adalah hal yang mutlak dan mengikat bagi semua karyawan. Mutu adalah tanggung jawab semua karyawan yang bekerja di jajaran BKI.

As a company applying quality management system based on ISO 9001:2000, BKI is committed to satisfy the customers and make a continuous improvement. Company's Quality Policy is "giving priority to serve the customers with a high attention to Safety and Quality aspects"

In realizing the commitment, BKI has Company's values applied to all organizational staff, covering:

- *Company's motto is "RELIABLE", means services given are quality, reliable, efficient, timely and reputable.*
- *Company's values are Integrity, Professionalism, Customer Satisfaction, Leadership and Reward to Employee's Performance.*
- *Company's culture is "TERTIB" (Devotion to the God; High work ethic; Improved reputation; being orderly in applying management's policy and personal attitude; Mastered science and technology; Good in service and work result).*

BKI management shall committed that:

- *Being oriented to international quality standard in accordance with ISO 9001:2000 requirements and fulfilling the attainment of company's quality objective as well as always continuously improving the quality.*
- *Applying quality system and the company's values in all service activities.*
- *Being responsive to the customers/public need and giving priority to the customer satisfaction and safety aspect.*
- *All personnel are always given understanding on quality system through a continuous training as well as quality system application to all organizational staff.*

Fulfillment of quality policy, procedures and instruction shall be imperative and bind all employees. Quality is responsible of all employees joining BKI.





Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan kepada kita dalam melalui tahun 2007. Tahun 2007 merupakan tahun yang baik bagi kita semua, karena kondisi sosial politik dan keamanan yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, dan tingkat inflasi serta suku bunga yang menurun, mampu mendorong aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan kondisi makro perekonomian nasional yang semakin kondusif, Dewan Komisaris mencatat kinerja bisnis (usaha) PT. Biro Klasifikasi Indonesia tahun 2007 cukup menggembirakan, walaupun industri perkapalan dan pelayaran nasional belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dengan mempertimbangkan kondisi bisnis sepanjang tahun 2007 dan upaya pelayanan terbaik seluruh jajaran PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada semua pemangku kepentingan atas pencapaian prestasi dan kinerja PT. Biro Klasifikasi Indonesia tahun 2007 yang cukup baik tersebut.

First of all, let's us praise the One and Only God who has lead us to pass through the year 2007. The year 2007 is a good year for all of use because stable socio-political and security condition, respectable economic growth and reducing inflation and interest rates in the year could motivate the economic activities.

In line with the more conducive national macro economy condition, the Board of Commissioners records that business performance of PT. Biro Klasifikasi Indonesia in 2007 is quite gladdening despite the insignificant growth of the national shipping. By considering the business condition along 2007 and the best service of all staff of PT. Biro Klasifikasi Indonesia, the Board of Commisioner gives appreciations to all interest bearers for the respectable performance of PT. Biro Klasifikasi Indonesia in 2007.

PT. Biro Klasifikasi Indonesia telah berhasil meningkatkan produksi, laba usaha dan laba sebelum pajak dibanding prestasi kinerja yang sama pada tahun 2006, dengan hasil audit laporan keuangan yang menyatakan wajar dalam semua hal yang material. Secara umum, program kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan target kinerja yang ditetapkan Pemegang Saham dapat terlampaui di tahun 2007. Pencapaian kinerja ini tentunya akan semakin memudahkan PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk menjawab tantangan yang masih harus dihadapi perusahaan ke depan terutama terkait dengan jaringan pelayanan yang semakin bermutu, peningkatan kemampuan SDM dan pendanaan yang diperlukan. Upaya pemenuhan tantangan tersebut secara konsisten diharapkan nantinya dapat menghasilkan kepercayaan penuh dari Pemerintah RI untuk memberikan tambahan pelimpahan wewenang survey statutory kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

Pada tahun 2007 PT. Biro Klasifikasi Indonesia berhasil mencapai kemajuan penting di bidang tata kelola perusahaan. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasannya, pada pertengahan tahun 2007 telah dibentuk Komite Audit. Demikian pula, sebagai wujud tanggung jawab manajemen untuk pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), untuk pertama kali telah dilakukan penilaian atas penerapan GCG oleh Asessor Independen, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Selanjutnya, Dewan Komisaris berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Direksi beserta segenap karyawan atas kerja keras dan komitmen yang tinggi sehingga berhasil mencapai kemajuan dan peningkatan kinerja. Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan arahan yang diberikan, sehingga Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Sebagai penutup, Komisaris senantiasa menekankan pentingnya bagi manajemen dan seluruh jajaran PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk tetap berkomitmen dalam memenuhi kebijakan, prosedur dan petunjuk kerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada pelanggan dan semua pihak yang berkepentingan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita dalam melaksanakan seluruh tugas dan memanfaatkan peluang-peluang di masa depan untuk kinerja PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang lebih sukses.

a.n. Dewan Komisaris
PT. Biro Klasifikasi Indonesia

Komisaris Utama



Capt. Albert Lapian

PT. Biro Klasifikasi Indonesia has successfully increased production, business profit and profit before tax than those in 2006 with the proper financial statement audit result in all materials respects. In general, work program can be performed well and performance target determined by Shareholders in 2007 can be exceeded. This attainment of performance is intended to respond to the future challenges to encounter by the company particularly those relating to more quality service network. The consistent fulfillment of the challenges can expectedly gain the full trust from the Government of the Republic of Indonesia to provide PT. Biro Klasifikasi Indonesia with additional delegation of authority.

In 2007, PT. Biro Klasifikasi Indonesia successfully attained the significant progress in good corporate governance activities. An Audit Committee was formed amidst 2007 for smooth and better implementation of tasks of the Board of Commissioners in supervisory function. Likewise, to realize the responsibility of the management for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, GCG application has for the first time been assessed by the Independent Assessors so that aspects still requiring improvement can be known.

Further, Board of Commissioners expresses its high gratitude and appreciation to all members of Board of Directors and employees for their hard work and high commitment thereby successfully attaining performance progress and improvement. Board of Commissioners also expresses its gratitude to Shareholders for their supports and directions thereby making it able to implement their tasks and responsibilities properly.

In closing, the Commissioners always emphasize all staff of PT. Biro Klasifikasi Indonesia to consistently commit to fulfill work policies, procedures, instructions to provide the client and the relevant parties with the best service. May the One and Only God guide us to implement all tasks and use the future opportunities for the more successful performance of PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

on Behalf of Board of Commissioners of
PT. Biro Klasifikasi Indonesia

President Commissioner



Capt. Albert Lapian

Profil Dewan Komisaris *Board of Commissioners Profile*



Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP.20/MBU/2004 tanggal 3 Maret 2004, adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Capt Albert Lopian
- Komisaris : Drs. Budiarmo Teguh Widodo
- Komisaris : Drs. Achmad Chotibudin, MM

Composition of Board of Commissioners by virtue of Decree of the Minister of State-Owned Corporations No. KEP.20/MBU/2004 dated March 3, 2004 shall be as follows:

- *President Commissioner* : Capt Albert Lopian
- *Commissioner* : Drs. Budiarmo Teguh Widodo
- *Commissioner* : Drs. Achmad Chotibudin, MM



Capt. Albert Lopian

Komisaris Utama;

Usia 62 tahun; Pendidikan : Mualim I Pelayaran Besar (1970), ANT I (2001), Master Mariner (2005); Pengalaman : Pertamina Perkapalan (1971-1975), National Bulk Carrier ((1975-1976), PT.KS Kallog (1976-1978), PT.Sumber Mas Indah Plywood (1978-1979), Departemen Perhubungan (1980-2005).

President Commissioner;

62 years old, Education : Ocean Going Shipping 1st Navigator (1970), ANT I (2001), Master Mariner (2005); Experience : Pertamina Perkapalan (1971-1975), National Bulk Carrier ((1975-1976), PT.KS Kallog (1976-1978), PT.Sumber Mas Indah Plywood (1978-1979), Ministry of Communication (1980-2005).



Drs. Boediarso Teguh Widodo, MSi

Komisaris;

Usia 49 tahun; Pendidikan : S1 Ekonomi Undip Semarang (1982), Magister Perencanaan & Kebijakan Publik FE UI (2005); Pengalaman : Departemen Keuangan, terakhir menjabat Direktur Penyusunan APBN sejak 2004.

Commissioner;

49 years old; Education : S1 Ekonomi Undip Semarang (1982), Master of Public Planning & Policy of FE UI (2005); Experience : Ministry of Finance, recently occupying the position of the Director of National Budget Planning as of 2004.



Drs. Achmad Chotibudin, MIM

Komisaris;

Usia 59 tahun; Pendidikan : S1 STIA LAN Jakarta (1982), MM Univ. Setiagama (1995), Pengalaman : Departemen Keuangan (1973-2005).

Commissioner;

59 years old; Education : S1 STIA LAN Jakarta (1982), MM Univ. Setiagama (1995), Experience : Ministry of Finance (1973-2005).



Ditengah mulai kembali bergerakanya industri perkapalan dan pelayaran nasional setelah terbitnya INPRES Nomor 5 Tahun 2005, pada awal 2007 terjadi serangkaian musibah kecelakaan kapal yang mengejutkan kita semua. Kejadian yang sangat memprihatinkan ini mengingatkan kita tentang betapa penting dan mendesaknya menegakkan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran.

BKI sebagai badan klasifikasi juga tidak lepas dari sorotan tajam, kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi badan klasifikasi disebagian kalangan menjadikan BKI sering dipojokkan dengan pernyataan-pernyataan yang menganggap BKI yang paling bertanggung jawab. Wacana reformasi dan restrukturisasi kelembagaan BKI juga digulirkan dan profesionalisme serta independensi menjadi isu utama yang dipermasalahkan.

Menyikapi situasi dan kondisi demikian ini Manajemen BKI melakukan langkah-langkah pendekatan dan sosialisasi tugas dan fungsi badan klasifikasi kepada pihak-pihak yang terkait. Dari hasil pemeriksaan instansi yang berwenang serta sidang Mahkamah Pelayaran terungkap bahwa dalam kecelakaan-kecelakaan yang terjadi tersebut tidak ada yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian BKI. Walaupun demikian Manajemen BKI tetap melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan maupun kelalaian prosedural yang bisa merugikan atau mempengaruhi aspek keselamatan kapal. Pelatihan-pelatihan internal dan eksternal yang bertujuan memberikan penyegaran dan updating dalam bidang klasifikasi dan statutoria diadakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM BKI.

Amidst the progress of the national marine and shipping industry after the issue of the Presidential Directive Number 5 of 2005, series of shocking ship accidents occurred in the beginning of 2007. It reminds us how important and urgent to enforce the regulations relating to maritime safety.

As a classification society, BKI is also not irrespective of sharp attention, lack of comprehension of tasks and functions of classification society to some people makes BKI frequently cornered with statements that BKI is the mostly responsible party thereby expressing BKI reform and restructuring discourses and professionalism and independence become the main issues.

Realizing such situation and condition, BKI management takes the approach measures to socialize the tasks and functions of classification society to the relevant parties. Findings of inspection by the relevant agencies and court of Shipping Court indicate reveal that none of the accidents is resulting from BKI mistake or negligence. However, BKI Management remains making internal audit to ensure that there is no procedural mistake or negligence that can harm or influence ship safety aspects. Internal and external training intended to refresh and update the classification and statutory matters are held to improve the professionalism and competence of BKI human resources.

Perhatian Manajemen BKI yang besar terhadap peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM ini antara lain diwujudkan melalui pembangunan ruangan khusus diklat yang telah dapat dimanfaatkan di awal 2007. Berbagai pelatihan internal, seminar, dan presentasi teknik dari kalangan industri terkait dan pihak asuransi juga diadakan untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan SDM teknik BKI.

Dari sisi usaha klasifikasi, jumlah kapal yang tercatat dalam Register kapal BKI pada akhir tahun 2007 sebanyak 10.601 unit dengan total 10.524.808 GT dibandingkan tahun 2006 yang berjumlah 10.044 unit atau 9.579.180 GT.

Dalam bidang Konsultansi dan Supervisi, BKI mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah untuk menjadi konsultan pengawas pada proyek pembangunan Kapal Penumpang ke 24 milik Ditjen Perhubungan Laut yang sedang dibangun di galangan Joss L. Meyer, di Papenburg, Jerman. BKI juga memperluas scope kerjasama yang telah dijalin sebelumnya dengan Ships Classification Malaysia (SCM) ke dalam bidang inspeksi fasilitas Migas lepas pantai. Dalam bidang Migas, BKI juga masih dipercaya melanjutkan inspeksi dan sertifikasi proyek Petrochina di Jabung, Jambi yang meliputi SKKP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, dan SKPI.

Untuk mengembangkan segmen usaha Konsultansi dan Supervisi, BKI juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan TUV Nord, salah satu perusahaan jasa inspeksi dan sertifikasi teknik terkemuka Jerman. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kemampuan BKI dalam menangani proyek-proyek inspeksi dan sertifikasi teknik bidang marine, transportasi, dan industri pertambangan akan lebih baik.

Kondisi sosial dan perekonomian nasional selama 2007 yang relatif stabil dan cukup kondusif menjadikan BKI mampu mempertahankan tingkat kesehatan kinerja keuangannya. Realisasi pendapatan keseluruhan meningkat dari Rp 136,3 milyar pada tahun 2006 menjadi Rp 163,2 milyar, yang berasal dari sektor jasa klasifikasi sebesar Rp 102,1 milyar atau naik 20,1 % dan sektor jasa konsultansi dan supervisi sebesar Rp 61,0 milyar atau naik 17,6 %. Sementara untuk realisasi laba setelah pajak menjadi sebesar Rp 16,5 milyar atau meningkat 13,5 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan standard penilaian Kementerian BUMN dan hasil audit Kantor Akuntan Publik, BKI kembali dapat mempertahankan tingkat kinerja manajemen "Sehat AAA" untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari angka Net Return on Equity (Net ROE) yang mencapai 34,51% dan Net Return on Asset (ROA) yang mencapai 25,39%. Bila dibandingkan suku bunga bank yang berlaku pada akhir 2007 sebesar 8 – 11% per tahun, angka-angka ini menunjukkan kinerja manajemen dalam memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham atau terhadap total asset secara umum cukup baik. Dalam hal penerapan Good Corporate Governance (GCG), telah dilakukan beberapa perbaikan dari buku Panduan Penerapan GCG serta dibentuknya Komite Audit. Penilaian terhadap efektifitas penerapan GCG telah dilakukan oleh Asesor Independen dengan nilai capaian 73 diatas dari target yang ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI) sebesar 60.

Big attentions of the BKI Management to the improvement of professionalism and competence are among others realized through construction of education and training room that has been used in the beginning of 2007. Various in-house trainings, seminars and technical presentations of those active in industrial sector and insurance parties are also held to improve the perception and knowledge BKI technical human resources.

From classification business side, total ships registered in BKI ships Register at the end of 2007 are 10,601 units or totaling 10,524,809 GT while those in 2006 are 10,044 units or 9,579,180 GT.

In Consultancy and Supervision sector, BKI receives the Government's trust to become a supervisory consultant in the construction of the 24th Passenger Ship belonging to Directorate General of Sea Transportation under construction at shipyard of Joss L. Meyer, in Papenburg, German. BKI also extends the scope of cooperation already made with Ships Classification Malaysia (SCM) to offshore oil and natural gas facility inspection sector. In oil and natural gas sector, BKI is also trusted to continue Petrochina project inspection and certification in Jabung, Jambi covering SKKP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, and SKPI.

To develop the Consultancy and Supervision business segment, BKI has also signed a cooperation agreement with TUV Nord, one of the Germany foremost engineering inspection and certification service companies. The cooperation project can expectedly make BKI capability to handle technical inspection and certification projects in marine, transportation, and mining industry sector better.

The relatively stable and quite conducive national socio and economic condition makes BKI able to maintain its sound financial performance rate. Income realization on the whole increases from Rp 136.3 billion in 2006 to Rp 163.2 billion, originating from classification service sector in the amount of Rp. 102.1 billion or increasing 20.1% and consultancy and supervision sector in the amount of Rp 61.0 billion or increasing 17.6 %. While, profit after tax realization becomes Rp 16.5 billion or increasing 13.5 % than that in the previous year.

Based on rating standards of Ministry of State-Owned Corporations and audit results of Public Account's Office, BKI can keep "AAA Sound" management performance level for fourth consecutive times. The success is not irrespective of Net Return on Equity (Net ROE) of 34.51% and Net Return on Asset (ROA) of 25.39%. If compared to the applicable bank interest rate by 8 – 11% per annum, the rates indicates in general the management performance in maximizing the profit to shareholders or total assets is respectable. In case of Good Corporate Governance (GCG) application, GCG Manuals have been revised and Audit Committee has been formed. The effectiveness of GCG application has been assessed by an Independent Assessor with the attainment value of 73 above the given target in Key Performance Indicator (KPI) namely 60.

Melihat catatan perjalanan BKI sepanjang tahun 2007, patutlah kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih-sayang, petunjuk, dan lindungannya karena tanpa semua itu tiada daya dan upaya kita untuk dapat merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2007 dengan hasil yang baik.

Mewakili Manajemen, staf, dan karyawan BKI kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut beserta jajarannya, kepada Menteri Negara BUMN c.q. Deputi Menteri bidang Logistik dan Pariwisata beserta staf, serta kepada Menteri Perindustrian c.q. Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika atas segala bantuan, dukungan, dan arahan teknis maupun managerial yang diberikan.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan juga kepada Dewan Komisaris yang selalu siap memberikan masukan, arahan, dan koreksi serta menjadi mitra kerja yang konstruktif sehingga Perusahaan dapat merealisasikan program kerjanya dan memberikan kontribusi positif kepada Bangsa dan Negara.

Kepada seluruh karyawan dan karyawan BKI di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, Direksi juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala sumbangsih, loyalitas, dan pengorbanan yang Saudara-saudara berikan dalam ikut mensukseskan realisasi program kerja Perusahaan.

Mengakhiri pesan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan yaitu INSA, GAPASDAP, AAUI, IPERINDO, K3I dan lain-lainnya atas segala dukungan, bantuan, dan partisipasinya dalam ikut memberdayakan dan memajukan BKI.

Semoga Allah SWT selalu meridhohi niat baik dan usaha kita.

A.n Direksi
Direktur Utama



Muchtar Ali

Seeing BKI activity records during 2007, it is worth expressing our gratitude to the One and Only God for His mercy, affection, direction, and protection because without which we can not realize the Company Work and Budgetary Plan of 2007 with good results.

We, representing the management, staff, and employees of BKI, would like to give our appreciation and gratitude to the Minister of Communication c.q. the Director General of Sea Communication and its staff, the State Minister for State-Owned Corporations c.q. the Deputy Minister in Logistics and Tourism sector and his staff, as well as the Minister of Industry c.q. the Director General of Means of Transportation and Telecommunication and Information for their technical assistances, supports and directions.

We also would like to express our appreciation and gratitude to Board of Commissioners who is always prepared to give inputs, directions, and corrections and be the constructive working partner thereby making the Company able to realize its work program and give the positive contribution to the Nation and State.

The Board of Directors also would like to express its gratitude and appreciation to all BKI employees both in Head Office and Branch Offices for their dedication, loyalty, and sacrifice in realizing the Company work program.

Finally, we also would like to express our gratitude and appreciation to the interest bearers namely INSA, GAPASDAP, AAUI, IPERINDO, K3I, etc for their supports, assistances, and participations in empowering and developing BKI.

May Allah SWT always bless our good intentions and efforts.

*On behalf of Board of Directors
President Director*



Muchtar Ali



Susunan Direksi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.88/MBU.2004 tertanggal 8 September 2004 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| • Direktur Utama | : Ir. Muchtar Ali |
| • Direktur Keuangan & Personalia | : Drs. Donny S.Purba |
| • Direktur Teknik | : Ir. Haryanto |
| • Direktur Usaha | : Ir. R. Wibisono, MM |

Composition of Board of Directors by virtue of Decree of the Minister of State-Owned Corporations No.88/MBU.2004 dated September 8, 2004 shall be as follows :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • President Director | : Ir. Muchtar Ali |
| • Director of Finance and Personnel | : Drs. Donny S.Purba |
| • Director of Engineering | : Ir. Haryanto |
| • Director of Business | : Ir. R. Wibisono, MM |



Ir. Muchtar Ali

Direktur Utama;

Usia 65 tahun, Pendidikan : S1 Teknik Perkapalan Unhas Makassar (1965), S2 Manajemen/SDM STIE-ISM Jakarta; Pengalaman : PT.Trihasta (1965-1966), PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1966-sekarang), Direktur Teknik (1999-2004), Direktur Utama (2004-sekarang).

President Director;

65 years old, Education: Master of Shipping Engineering Unhas Makassar (1965), S2 of Management/Human Resources STIE-ISM Jakarta; Experience : PT.Trihasta (1965-1966), PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1966-now), Director of Technique (1999-2004), President Director (2004-now).



Ir. Wibisono, MM

Direktur Usaha;

Usia 53 tahun; Pendidikan : S1 Teknik Perkapalan ITS Surabaya (1977), S2 Manajemen STIE IPWI; Pengalaman : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1982-sekarang), Direktur Usaha (2004-sekarang).

Director of Business;

53 years old; Education : Master of Shipping Engineering ITS Surabaya (1977), S2 of Management STIE IPWI; Experience : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1982-now), Director of Business (2004-now).



Drs. Donny S. Purba

Direktur Keuangan & Personalia;

Usia 62 tahun, Pendidikan : S1 Ekonomi UI (1979), Diplome Program in Financial Studies, Stratchclyde University (1985); Pengalaman : Departemen Keuangan (1981-1998), Kantor Menteri Negara BUMN (1998-1999), Direktur Keuangan & Personalia (1999-sekarang).

Director of Finance & Personnel,;

62 years old, Education : Master of Economy UI (1979), Diploma Program in Financial Studies, Stratchclyde University (1985); Experience : Ministry of Finance (1981-1998), Office of the State Minister for State-Owned Corporations (1998-1999), Director of Finance & Personnel (1999-now).



Ir. Haryanto

Direktur Teknik;

Usia 61 tahun; Pendidikan : S1 Teknik Perkapalan ITS Surabaya (1974); Pengalaman : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1974-sekarang), Direktur Teknik (2004-sekarang).

Director of Engineering;

61 years old; Education : Master of Shipping Engineering ITS Surabaya (1974); Experience : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1974-now), Director of Engineering (2004-now).



Mengawali awal tahun, pada tanggal 22 Januari 2007 telah diadakan pelantikan pejabat Eselon I, II, dan III penyegaran organisasi melalui promosi vertikal dan horizontal sebagai upaya mengantisipasi perubahan dan tantangan usaha BKI.

Dalam rangka mengembangkan bidang usaha Konsultasi dan Supervisi dalam tahun 2007 ini Manajemen BKI telah menandatangani perjanjian kerjasama antara lain dengan TUV Nord, salah satu perusahaan jasa inspeksi teknik terkemuda dari Jerman pada tanggal 15 Maret 2007 di Kantor Pusat BKI. Sementara untuk mengembangkan bidang usaha Klasifikasi, Manajemen BKI yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Teknik juga mengunjungi kantor pusat Germanischer Lloyd di Hamburg dan galangan kapal Jos L. Meyer di Papenburg pada tanggal 28 November 2007.



On January 22, 2007, the officials in 1st, 2nd and the 3rd Echelons have been inaugurated and organization refreshing has been made through the vertical and horizontal promotions as the efforts to anticipate the change and business challenges of BKI.

In the framework of developing the Consultancy and Supervision line of business in this 2007, BKI Management has signed cooperation agreements among others with TUV Nord, one of the Germany foremost engineering inspection service companies on March 15, 2007 in Head Office of BKI. While, to develop the Classification line of business, BKI Management represented by the President Director and Director of Engineering also visited head office of Germanischer Lloyd in Hamburg and shipyard of Jos L. Meyer in Papenburg on November 28, 2007.



Peran dan kontribusi BKI dalam bidang Maritime Safety selama tahun 2007 ini terus ditingkatkan. BKI secara aktif ambil bagian dalam acara Round Table Discussion Pemberdayaan Badan Klasifikasi Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut tanggal 7 Mei 2007. Selain itu BKI juga memfasilitasi penyelenggaraan acara pertemuan Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I) tanggal 8 Mei 2007 di Hotel Mercure Ancol sebagai sarana



The roles and contributions of BKI in Maritime Safety during 2007 are continuously improved. BKI actively takes part in Round Table Discussion on the National Classification Agency Empowerment held by Center of Sea Transportation Research and Development on May 7, 2007. In addition, BKI also facilitates the holding of Indonesia Classification Consultancy Committee (K3I) meeting on May 8, 2007 in Mercure Hotel Ancol as the place of dialogues and discussions for the stakeholders to give the

dialog dan diskusi para stakeholders untuk memberikan masukan dan saran yang penting bagi perkembangan BKI ke depan. BKI juga berperan aktif mendukung upaya peningkatan aspek keselamatan kapal ferry ro-ro dengan menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional Keselamatan Kapal Ferry Ro-Ro yang diselenggarakan oleh Universitas Dharma Persada, Jakarta.



Secara internal, Manajemen BKI senantiasa menaruh perhatian pada upaya konstruktif untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas Perusahaan. Sehubungan dengan itu telah diadakan Rapat Kerja dan Technical Operational Meeting Surveyor dan Inspector (TOMSI) di Semarang, tanggal 8 – 13 September 2007.

significant inputs and advices for the future development of BKI. BKI also plays its active role in the improvement of ro-ro ferry ship by serving as the speaker in Ro-Ro Ferry Ship Safety National Seminar held by Dharma Persada University, Jakarta.



Internally, BKI Management always pays attention to the constructive efforts to improve the company performance and productivity. Therefore, Annual Meeting and Technical Operational Meeting for Surveyors and Inspectors (TOM-SI) were held in Semarang on September 8 –13, 2007.



Sebelumnya juga diadakan rapat Evaluasi Kinerja Semester I pada tanggal 3 – 4 Juli 2007 di Kantor Pusat BKI untuk cek posisi pencapaian target usaha dan membahas kebijakan strategis untuk mensukseskan pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Selain itu juga diberikan penghargaan kepada Unit Produksi Terbaik dalam acara Rapat Evaluasi Kinerja Semester I



Semester I Performance Evaluation Meeting was also held at Head Office of BKI on July 3- 4, 2007 to check the attainment of business target and discuss the strategic policies to make successful the attainment of Company Work and Budgetary Plan. In addition, reward was also given to the Best Production Unit in Semester I Evaluation Meeting.



Pengembangan SDM adalah sangat strategis bagi peningkatan reputasi BKI. Dalam tahun 2007 ini tercatat BKI telah mengirimkan beberapa technical staf dan surveyor untuk training di luar negeri dan juga belajar S2/S3, antara lain World Maritime University (WMU) di Malmö, Swedia dan juga beberapa kali menyelenggarakan kegiatan inhouse training, antara lain :

- Penyelenggaraan In-House Training Penilaian Kondisi & Harga Kapal yang diadakan pada tanggal 25 – 26 Januari 2007 di Kantor Pusat BKI.
- Penyelenggaraan In-house Training Inspektur Terpadu bidang Konsultansi & Supervisi yang diadakan pada tanggal 21 – 25 Mei 2007 di Kantor Pusat BKI.
- Penyelenggaraan In-house Training ISPS Code bagi para Surveyor dan Auditor BKI yang diselenggarakan pada tanggal 4 – 8 Mei 2007 di Ruang Training Kantor Pusat BKI.
- Penyelenggaraan Training Asisten Surveyor BKI tanggal 28 Mei – 4 Juni 2008 di Ruang Training Kantor Pusat BKI.
- Penyelenggaraan acara presentasi dan diskusi bidang Ship Electrical Technology dari Taiyo Electric perwakilan Indonesia pada tanggal 10 Juli 2007 di Kantor Pusat BKI.
- Penyelenggaraan acara presentasi dan diskusi Ship Coating Technology dari PT. Jotun Indonesia pada tanggal 13 Juli 2007 di Kantor Pusat BKI.
- Penyelenggaraan acara presentasi dan seminar Marine Hull Insurance tanggal 6 Desember 2007 di Kantor Pusat BKI.

Manajemen juga selalu berupaya meningkatkan public awareness terhadap visi dan misi BKI antara lain melalui pertemuan dengan asosiasi dan pihak-pihak terkait serta aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pameran untuk memperkenalkan dan mempromosikan bidang-bidang usaha BKI. Kegiatan tersebut, antara lain :



HRD is very strategic to improve BKI reputation. It is recorded that in 2007, BKI has sent several technical staff and surveyors to participate in trainings overseas and also take S2/S3 study, among others World Maritime University (WMU) in Malmö, Sweden and holds in-house trainings for several times, among others:

- *Ship Condition & Price Assessment In-House Training on January 25-26, 2007 at Head Office of BKI.*
- *Consultancy & Supervision Integrated Inspectors In-House Training on 21-25 May, 2007 at Head Office of BKI.*
- *ISPS Code In-House Training to BKI Surveyors and Auditors on May 4-8, 2007 in Training Room of Head Office of BKI.*
- *BKI Assistant Surveyors Training on May 28 – June 4, 2008 in Training Room of Head Office of BKI.*
- *Presentation and discussion on Ship Electrical Technology by Taiyo Electric representative office in Indonesia on July 10, 2007 at Head Office of BKI.*
- *Presentation and discussion on Ship Coating Technology by PT. Jotun Indonesia on July 13, 2007 at Head Office of BKI.*
- *Presentation and seminar on Marine Hull Insurance on December 6, 2007 at Head Office of BKI.*

The Management also always exerts its best to improve public awareness of BKI visions and missions among others through meetings with the relevant associations and parties as well as actively participates in various exhibitions to introduce and promote BKI lines of business. The activities are among others:





- Menerima kunjungan Indonesian Offshore Shipping Association (IOSA) tanggal 11 Juli 2007.
- BKI berpartisipasi dalam Pemeran Industri Penunjang Industri Perkapalan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian tanggal 6 – 10 Juni 2007.
- BKI ikut serta dalam pameran RI-TECH Expo 2007 yang diprakarsai oleh Kementerian Riset dan Teknologi di Kompleks Mega Glodok Kemayoran tanggal 8 – 12 Agustus 2007

- *Accepting the visit from Indonesian Offshore Shipping Association (IOSA) on July 11, 2007.*
- *Participating in Marine Supporting Industry Exhibition held by the Directorate General of Means of Transportation and Telecommunication and Information within the Ministry of Industry on June 6 – 10, 2007.*
- *Participating in RI-TECH Expo 2007 initiated by the Ministry of Research and Technology at Mega Glodok Komplek Kemayoran on August 8 – 12, 2007.*



Salah satu aspek dari pembangunan SDM yang tidak boleh dilupakan adalah pengembangan sisi mental-spiritual, berkaitan dengan itu Manajemen BKI telah menyelenggarakan acara bina mental baik melalui ceramah maupun pelatihan, antara lain :

- Bina mental dalam rangka HUT BKI 2007 tanggal 25 Juni 2007 dengan tema “boleh jadi kiamat sudah dekat”
- Pembekalan mental dalam acara refreshing training statutoria tanggal 8 Juni 2007 oleh motivator Ersya Syarief.
- Pembekalan mental dan kewirausahaan dalam Raker & TOMSI 2007 tanggal 12 November 2007 oleh Drs. Wijayanto, MA dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta.



One of the HRD aspects that may not be forgotten is mental-spiritual development. Therefore, BKI Management held mental development agenda both through speeches and trainings, among others:

- *Mental development in the framework of BKI Anniversary on June 25, 2007 with a theme “doomsday may be close”.*
- *Mental supplying in a statutory refreshing training on June 8, 2007 with Ersya Syarief as a motivator.*
- *Mental supplying and entrepreneurship in Annual Meeting and TOMSI 2007 on November 12, by Drs. Wijayanto, MA from Gajah Mada University Yogyakarta.*

Klasifikasi Kapal *Kapal Classification*



Dampak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan Permenhub KM. 20 tahun 2006 tentang kewajiban kapal bendera Indonesia memiliki klasifikasi dari BKI menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan register kapal kelas BKI, meskipun masih didominasi penerimaan kelas bangunan sudah jadi dibandingkan dengan penerimaan kelas bangunan baru.

Jumlah kapal yang diregister pada akhir Desember 2007 berjumlah 10.601 unit atau 106 % lebih besar dibandingkan tahun 2006 dengan total Gross Tonnage mencapai 10.524.808 GT. Jumlah penambahan kapal yang diregister pada tahun 2007 adalah 557 unit atau 945.628 GT.

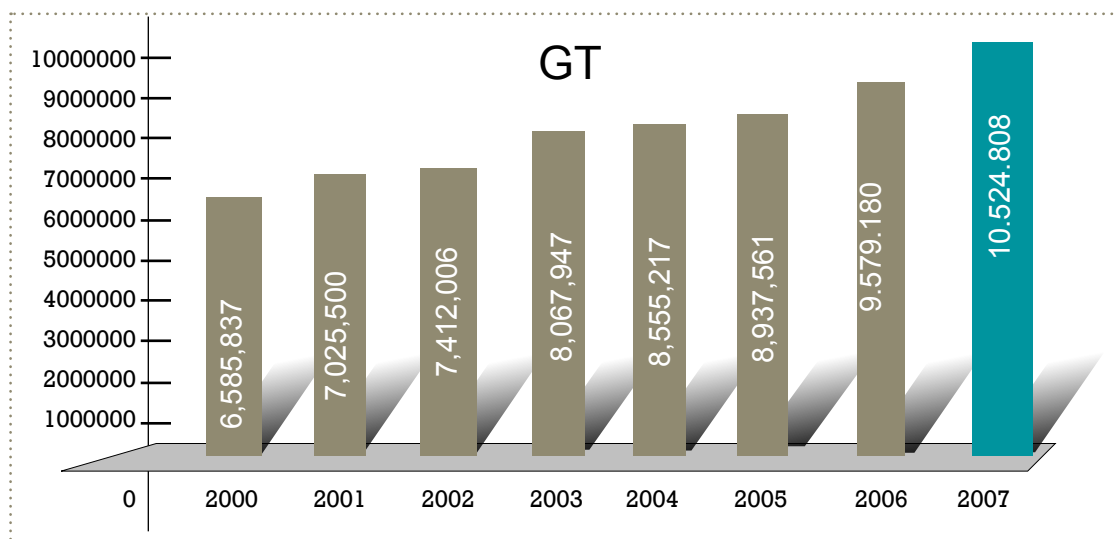
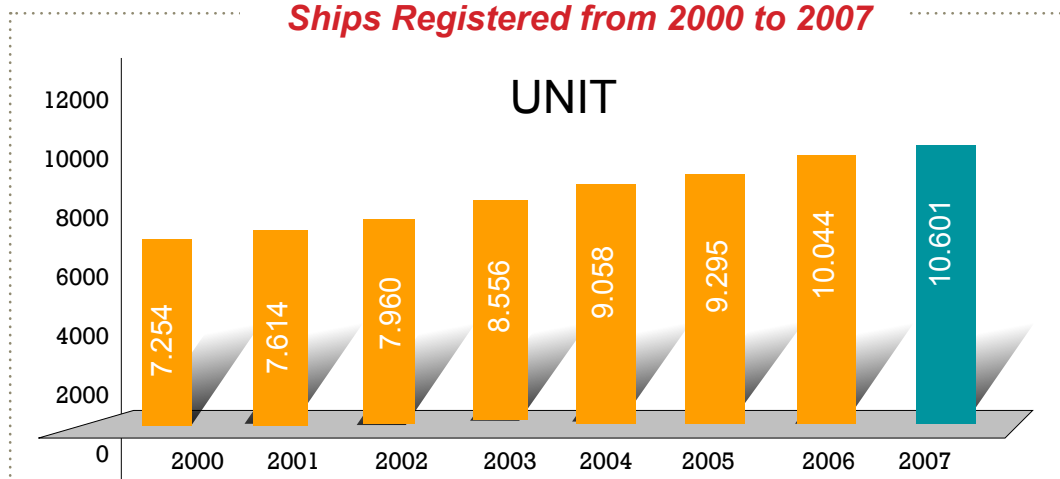
Kapal yang dicabut kelasnya sampai dengan tahun 2007 adalah 4.616 unit atau 3.578.887 GT. Pencabutan kelas ini dengan alasan tidak memenuhi persyaratan Rules & Regulation dengan mulai diterapkannya Automatic Class Suspension, pindah ke badan klasifikasi lain, tenggelam, di scrapp atau permintaan dari pemilik kapal. Sehingga kapal kelas BKI dengan status klas berlaku (valid class), menurun dari tahun 2006 yang sebesar 7.861 dengan tonase total 8 juta GT menjadi 5.985 unit dengan tonase total 6.954.678 juta GT.

Impact of issuing of Directive of the President of Republic of Indonesia No 5 of 2005 regarding empowering of national shipping industry and Permenhub no. KM. 20 of 2006 regarding obligation of Indonesia flag ship has classification from BKI, increasingly the number of ships regeistered to BKI Class, even the admission of class are still dominated by existing ship than new building.

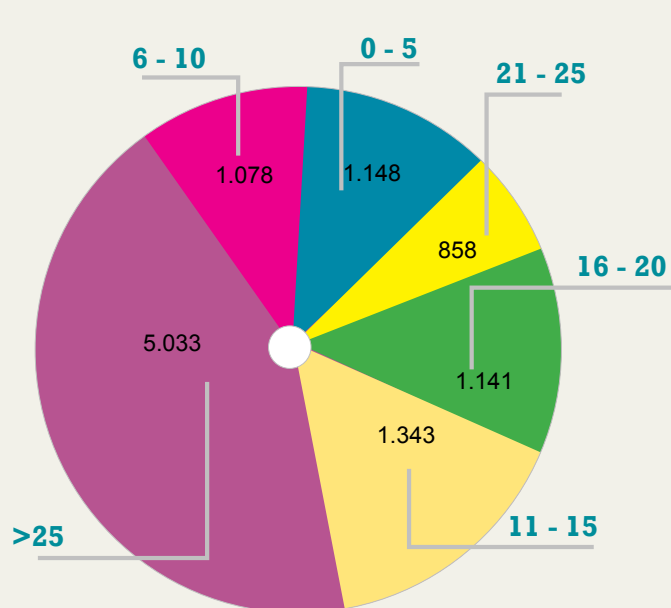
Total ships registered at the end of December 2007 are 10.601 units or 106 % higher than that in 2006 at a total Gross Tonnage of 10.524.808 GT. Total addition of ships registered in 2007 are 557 units or 945.628 GT.

Ships of which the class is withdrawn until 2007 are 4.616 units or 3.578.887 GT. The reason of this class withdrawn are failure to fulfill Rules & Regulations as starting of implementation of Automatic Class Suspension, change to another classification body, sinking, scrapping or request from ships' owners. So that, BKI class ships with the valid class status decrease from 7.861 units at a total tonnage of 8 million GT in 2006 to 5.985 units in this year at a total tonnage of 6.954.678 million GT.

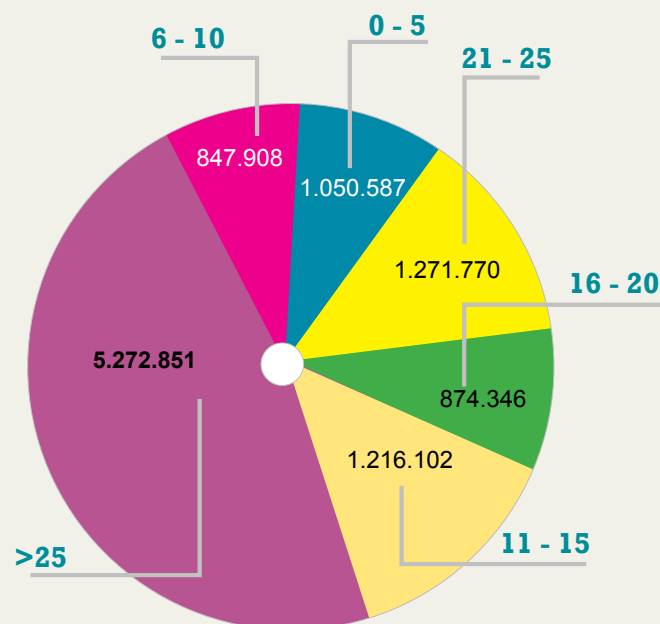
Kapal Register tahun 2000-2007
Ships Registered from 2000 to 2007



Kapal Kelas Valid sesuai umur Valid Class Ships by ship age



Ship Age
UNIT

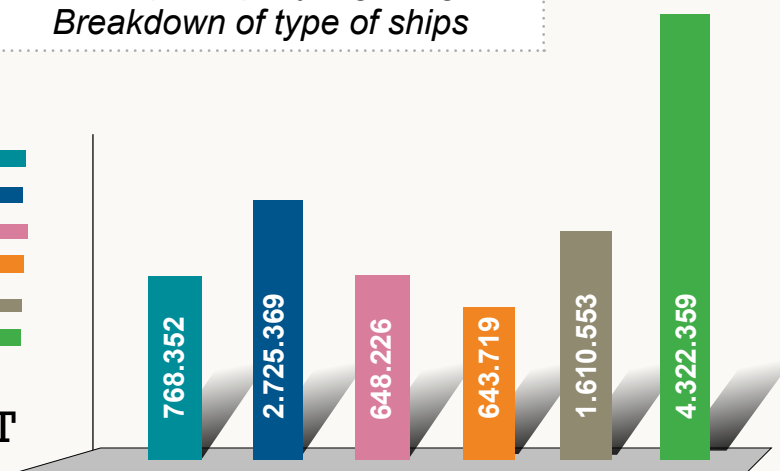


Ship Age
GT

Rincian Tipe Kapal yang diregister Breakdown of type of ships

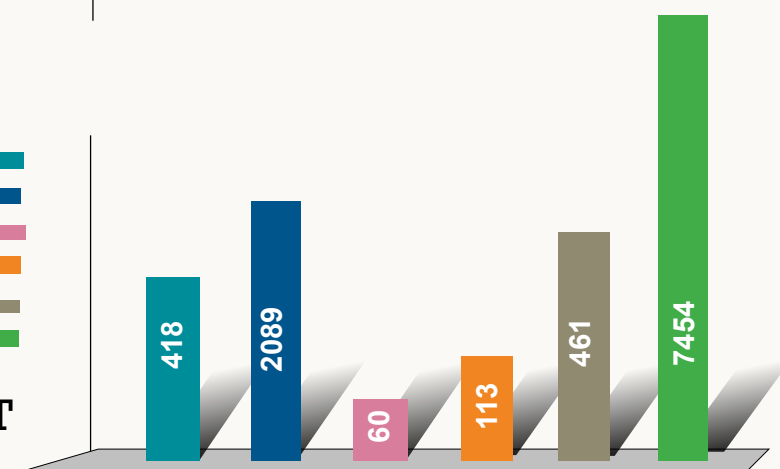
Passenger & Ferry
 General Cargo
 Bulk Carrier
 Container Ship
 Tanker
 Others

GT



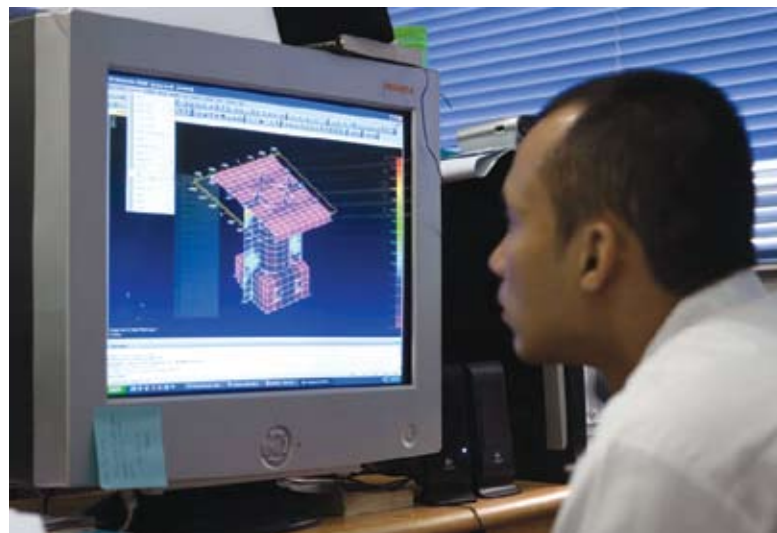
Passenger & Ferry
 General Cargo
 Bulk Carrier
 Container Ship
 Tanker
 Others

UNIT

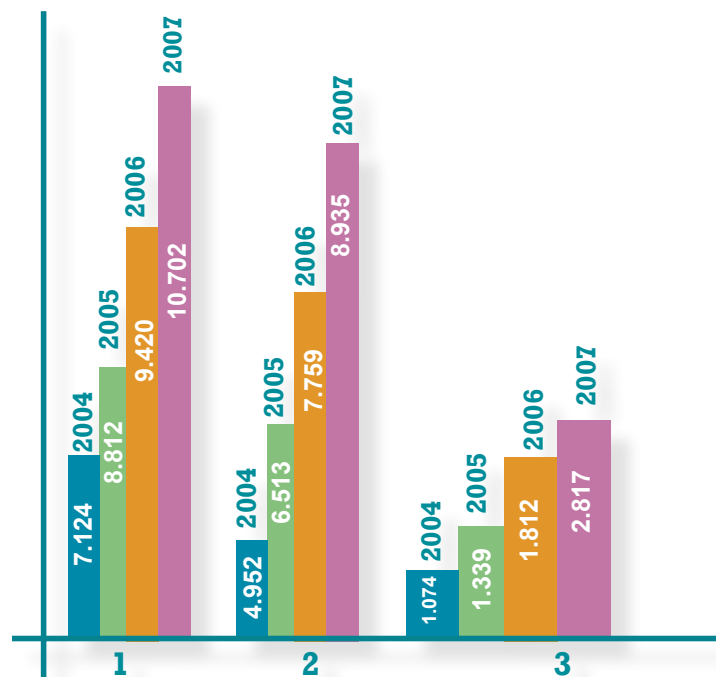


Persetujuan Gambar Drawing Approval

Pada tahun 2007, BKI menerima permintaan untuk drawing / plan approval yang terdiri dari 1763 kontrak dan 22.454 gambar / perhitungan. Diantaranya adalah 10.702 gambar konstruksi lambung, 8.935 gambar permesinan / listrik serta 2.817 gambar / perhitungan statutoria.



Year	2004	2005	2006	2007
Hull & Material	7.124	8.812	9.420	10.702
Machinery & Electrical	4.952	6.513	7.759	8.935
Statutory	1.074	1.339	1.812	2.817
Total	13.150	16.664	18.991	22.454



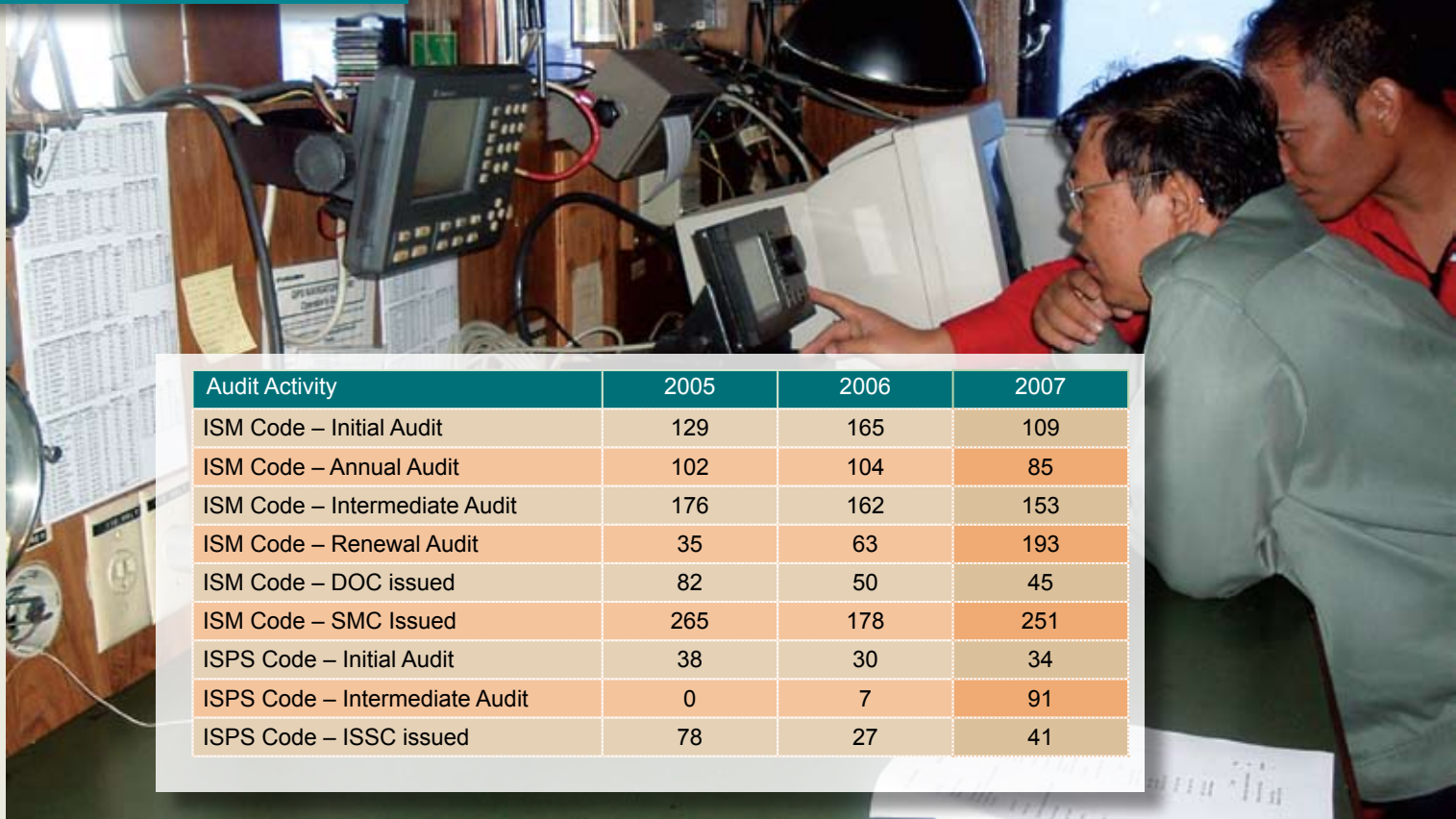
Hull & Material = 1
Machinery & Electrical = 2
Statutory = 3

Dalam pelaksanaan survey dilapangan, BKI menerima 15.004 permintaan survey yang terdiri dari 1.031 survey dalam rangka penerimaan kelas dan 13.973 survey dalam rangka mempertahankan kelas. Perincian jenis survey yang dilakukan adalah sbb :

In implementing its field surveys, BKI receives 15,004 application for survey consisting of 1,031 surveys for admission to class and 13,973 surveys in for class maintaining. The breakdown of kind of survey carried out, as follows:

Kind Survey	2004	2005	2006	2007
Renewal Survey	573	649	738	921
Annual Survey	2.807	3.035	3.110	3.619
Intermediate Survey	494	569	538	618
Docking Survey	1.815	2.029	2.207	2.514
Shaft Propeller Survey	614	984	1.162	1.114
Boiler Survey	129	122	164	208
Automation Survey	17	17	21	25
Continuous Survey	258	166	335	489
Class Extension Survey	175	150	97	238
Condition Survey	3.328	3.316	4.342	4.227
New Building Admission Class Survey	86	11	126	178
Existing Ship Admission Class Survey	383	396	599	753
Re-class Survey	18	49	70	100
Total	10.697	11.493	13.509	15.004





Audit Activity	2005	2006	2007
ISM Code – Initial Audit	129	165	109
ISM Code – Annual Audit	102	104	85
ISM Code – Intermediate Audit	176	162	153
ISM Code – Renewal Audit	35	63	193
ISM Code – DOC issued	82	50	45
ISM Code – SMC Issued	265	178	251
ISPS Code – Initial Audit	38	30	34
ISPS Code – Intermediate Audit	0	7	91
ISPS Code – ISSC issued	78	27	41

Sebagai Badan Klasifikasi, BKI juga dipercaya untuk melaksanakan Survey Statutoria atas nama Pemerintah Indonesia terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia.

BKI telah memiliki jumlah safety auditor 114 yang berkualifikasi untuk melaksanakan audit ISM Code dan 76 auditor untuk melaksanakan audit ISPS Code.

BKI juga menerbitkan Register ISM Code & ISPS Code yang dipublikasikan melalui media cetak maupun akses melalui website BKI.

As a Classification Society, BKI is also authorized to conduct Statutory Survey on behalf of the Government of Indonesia for Indonesian flagged ships.

BKI has totaling 114 qualified auditors to conduct ISM Code audits and 76 qualified auditors to conduct ISPS Code audits.

BKI also publishes ISM Code & ISPS Code Register by printed media and accessible in the BKI's website.



Hingga tahun 2007, otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI dibidang klasifikasi kapal dan statutoria adalah :

Until 2007, ship classification and statutory authorization trusted to BKI are:

- *Obligation of Indonesian flagged ships to have classification certificate from BKI.*
- *Survey Authorization to survey of loadline marks and issue loadline certificates (IPLT & PGMI) for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification for Container.*
- *Survey Authorization and Certification of Safety Construction, Marpol Annex I & II and Fitness of Chemical Carrier & Gas Carrier in Bulk for Indonesian flagged ships at a tonnage more than 500 GT.*
- *Audit Authorization and Certification of ISM Code for Indonesian flagged ships.*
- *As a Recognized Security Organization (RSO), conducting audit and certification of ISPS Code for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Annex VI Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Condition Assessment Scheme (CAS) in accordance with Annex I Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*

Sedangkan otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI di-bidang minyak & gas dan ketenaga-kerjaan adalah :

While, authorizations trusted to BKI in oil & gas and man-power sectors are:

- *Technical Inspection of Feasibility of Combined Facility Certificate from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Crane from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pressure Vessel from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pipeline from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Platform Construction from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Electrical Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Rotating Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Storage Tank from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Inspection and Testing of Crane from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Boiler and Pressure Vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Electric Equipment from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *BKI Laboratory for NDT and DT of material, equipment relating to boiler and pressure vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Crane, Pressure Vessel and Boiler onboard ship and at Harbour from Directorate General of Sea Transportation.*
- *Inspection of Helideck from Directorate General of Air Transportation.*

Sesuai dengan misi yang diemban, BKI juga melakukan riset dan pengembangan terutama untuk pengembangan Rules & Regulation sebagai standar teknis kapal serta mempublikasikannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan Rules & Regulation yang telah dilaksanakan tahun 2007 menghasilkan publikasi sebagai berikut :

In accordance with its mission, BKI also makes research and development, particularly Rules & Regulation development as ship technical standards. R&D activities during 2007 produce the publications as follows :

- *Rules for Classification and Surveys, Volume I - Edition 2007;*
- *Rules for Machinery Installation, Volume III - Edition 2007;*
- *Rules for Electrical Installations, Volume IV – Edition 2007;*
- *Rules for Automation, Volume VII – Edition 2007;*
- *Common Structural Rules for Tanker;*
- *Common Structural Rules for Bulk Carrier;*
- *Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers*

Hingga posisi akhir Desember 2007, BKI telah menerbitkan sejumlah Rules & Regulation, yaitu :

In Until at the end of December 2007, BKI has issued some Rules, namely:

List of BKI's Rules:

1. *Rules for Classification and Surveys (Volume I- 2007);*
2. *Rules for Hull (Volume II- edition 2006);*
3. *Rules for Machinery Installation (Volume III-Edition 2007);*
4. *Rules for Electrical Installations (Volume IV-Edition 2007);*
5. *Rules for Materials (Volume V-Edition 2006);*
6. *Rules for Welding (Volume VI-Edition 2004);*
7. *Rules for Automation (Volume VII-Edition 2007);*
8. *Rules for Refrigerating Installations (Volume VIII-Edition 2001);*
9. *Rules for Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk (Volume IX-Edition 2005);*
10. *Rules for Ships Carrying Dangerous Chemicals In Bulk (Volume X-Edition 2002);*
11. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 1-Hull Construction (Edition 1996);*
12. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 2-Machinery Installations (Edition 1996);*
13. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 3-Electrical Installation (Edition 1996);*
14. *Rules for High Speed Vessels (Edition 1996);*
15. *Rules for Fibreglass Reinforced Plastic Vessels (Edition 1996);*
16. *Rules for Wooden Ship (Edition 1996);*
17. *Rules for Mobile Offshore Drilling Units and Special Purpose Units (Edition 1999);*
18. *Rules for Stowage and Lashing of Containers (Edition 1999);*
19. *Rules for Classification and Construction of High Speed Craft (Edition 2000);*
20. *Rules for Offshore Mooring Chains (Edition 2000);*
21. *Rules for Mooring and Loading Installations (Edition 2002);*
22. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 1 : Rules For Classification and Survey- Edition 2002);*
23. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 2 : Rules For Structures Machinery Installations - Edition 2002);*
24. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 3 : Rules For Specific Type of Units and Equipment - Edition 2002);*
25. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 4 : Rules For Machinery Installations - Edition 2002);*
26. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 5 : Rules For Electrical Installations -Edition 2002);*
27. *Rules for Floating Docks (Edition 2002);*
28. *Rules for Fishing Vessels (Edition 2003);*
29. *Rules for Oil Recovery Vessel (Edition 2005);*
30. *Rules for Non Metallic Material (Edition 2006);*
31. *Common Structural Rules for Tanker;*
32. *Common Structural Rules for Bulk Carrier;*
33. *Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers.*

List of BKI's Regulation:

1. *Regulation for The Testing of Engines Produced in Series (Edition of 1996);*
2. *Regulation for The Calculation of Diesel Engines Crankshaft (Edition of 1996);*
3. *Regulation for The Seating of Diesel Engines Installations (Edition of 1996);*
4. *Regulation for The Design, Construction and Testing of Pumps (Edition of 1996);*
5. *Regulation for Equipment on The Fire Fighting Ships (Edition of 1996);*
6. *Regulation for Construction, Equipment and Testing of Closed Fuel Overflow System (Edition of 1996);*
7. *Regulation for The Installation and Ventilation of Storage Batteries and The Construction of Battery Chargers (Edition of 1996);*
8. *Regulation for Electromagnetic Compatibility of Electrical Equipment (Edition of 1996);*
9. *Regulation for Lighting (Edition of 1996);*
10. *Regulation for Variable Frequency Ships Mains Operation (Variable Frequency Operation (Edition of 1996);*
11. *Regulation for The Use of Computer and Computer Systems (Edition of 1996);*
12. *Regulation for The Performance of Type Test, Part 1 : Procedure (Edition of 2002);*
13. *Regulation for The Performance of Type Test, Part 2 : Test Requirements For Electrical / Electronic Equipment, Computer and Peripheral (Edition of 2002);*
14. *Regulation for The Performance of Type Test, Part 3 : Test Requirements For Sealing Systems of Bulkhead and Deck Penetrations (Edition of 2002);*
15. *Regulation for The Performance of Type Tests, Part 4 : Test Requirements for Electrical Machinery (Edition of 2002);*
16. *Regulation for The Performance of Type Tests, Part 5 : Test Requirements for Mechanical Components and Equipment (Edition of 2004);*
17. *Regulation for Mass Produced Engines (Edition of 1996);*
18. *Regulation for The Construction and Survey of Lifting Appliances (Edition of 1998);*
19. *Regulation for Construction, Repair and Testing of Freight Containers (Edition of 1999);*
20. *Regulation for Assessment and Repairs of Defects on Propellers (Edition of 2000);*
21. *Regulation for Constructions and Testing of Towing Gears (Edition of 2000);*
22. *Procedure & Guidelines for The ISM-Code (Edition 2002)*
23. *Regulation for The Life Saving Launching Appliances (Edition of 2001);*
24. *Guidelines for Ocean Towage (Edition of 2001);*
25. *Guidelines for The Explosion Protection of Electrical Equipment (Edition of 2001);*
26. *Guidelines for Sea Trials of Motor Vessels (Edition of 2002 - English & Indonesian);*
27. *Regulation for The Inspection of Anchor Chain Cables (Edition of 2002);*
28. *Regulations for Redundant Propulsion and Steering Systems (Edition 2002);*
29. *Guidelines for Inclining Test of Ships (Edition 2003);*
30. *Regulation for The Classification and Constrution of Fibre Reinforced Plastic Workboat (Edition 2003);*
31. *Regulation for Ventilation Systems on Beard Seagoing Ships (Edition 2004);*
32. *Regulation for The Corrosion Protection and Coating Systems (Edition 2004);*
33. *Regulation for The Bridge Design on Seagoing Ships One Man Console (Edition 2004);*
34. *Guidelines for The Carriage of Refrigerated Containers on Board Ships (Edition 2004);*
35. *Regulation for Analysis Technique, Strength and Stability (Edition of 2005);*
36. *Guidelines for The Preparation of Damage Stability Calculation and Damage Control Documentation On Board (Edition of 2005);*
37. *Procedure & Guideline for ISPS Code (Edition of 2004);*
38. *Guidelines for Thickness Measurements of ship's plate (Edition of 2005);*
39. *Guidelines for Condition Assessment Scheme (CAS)(Edition of 2006);*
40. *Guidelines for Classification & Construction of Wing-In Ground Craft (WIG-Craft) (Edition 2006);*
41. *Guidance for Implementation Marpol 73/78 Annex VI (Edition 2006).*



Inspeksi & Sertifikasi

Inspection & Certification

BKI juga memberikan jasa inspeksi dan sertifikasi terhadap industri dilingkungan minyak dan gas serta tenaga-kerjaan. BKI dipercaya untuk melakukan inspeksi dan sertifikasi berbagai proyek / pekerjaan, meliputi inspeksi dan sertifikasi atas nama Ditjen Migas, meliputi SKPP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, SKPI.

BKI also provides oil and natural gas industrial and labor inspection and certification services. BKI is entrusted to inspect and certify various projects/works, covering inspection and certification on behalf of the Directorate General of Oil and Natural Gas, covering SKPP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, SKPI.

OIL & GAS	ACTIVITY
Installation Use Feasibility PJIT	17
Lifting Device PJIT	99
Rigging Equipment/Lifting Device Testing Service	14
Pressure Vessel PJIT	10
Pressure Safety Valve (PSV) Testing Service	19
Distribution Pipe PJIT	11
Platform Construction PJIT	14
Electric Equipment PJIT	0
Pump, Compressor and Driver PJIT	5
Landfill Tank PJIT	26
Rig PJIT	1
SIMOM	4

LABOR AFFAIRS	ACTIVITY
Steam Instrument & Pressure Vessel Inspection & Testing	13
Wind Bottle Checking & Testing	106
Lifting & Transport Devices Inspection & Testing	21
PSV Calibration	3
Fire System	3
Lighting Rod	2
Generator set	5

TRANSPORATION	ACTIVITY
Helicopter deck inspection	4
Lifting & Transport Devices Inspection & Testing	4

CERTIFICATION SERVICES	ACTIVITY
- SIO Crane	11
- Welder Qualification	2
- Welding Procedure Specification	6
- Jetty	1

TECHNICAL INSPECTION SERVICES	ACTIVITY
- Container Metal Box	53
- Protection Cathodic Testing	22
- Lighting Rod	1
- Telkom Tower Inspection	0
- WTU Equipment inspection	1
- TKDN Attainment Verification	0
- Casing Tube Inspection	2
- Basket Inspection	77
- Welding Machine Inspection	5
- Skid and Spreader Bar Inspection	39
- Rental Water Bag	6
- Initial Inspection of Box Crossover Thread	0
- Periodical Inspection of Pressure Gauge	6
- Initial Inspection of 8-3/4" ACME Bowen Box	1
- Load Test Service/ Load Cell Lease	34
- Wire Rope Test Survey Service	9
- Repair Tank Supervision	5
- Transport Tank Certification	11
- Lifting & Transport Devices Certification	136
- Rigging Equipment & Lifting Device Certification	349
- Pressure Safety Valve & Pressure Control Certification	38
- Pressure Vessel Certification	29
- Drill Machine Certification	0
- Pump, Compressor & Driver Certification	39
- Refinery Equipment Inspection Service	18
- Rental Holiday Detector & Operator	1
- Landfill Tank Certification & Calibration	3



Pengujian & Laboratorium

Testing & laboratory

Dibidang pengujian BKI telah melaksanakan Destructive Test (DT) dan Non Destructive Test (NDT) dengan kegiatan, meliputi Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant, Uji Tarik dan Uji Takik dan lain-lain.

In testing sector, BKI has implemented Destructive Test (DT) and Non Destructive Test (NDT) covering Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant, Pull Test and Cut Test etc.

TYPES OF PRODUCTION ACTIVITIES	ACTIVITY
Non Destructive Test (NDT)	1214
Destructive Test (DT)	425



Rekayasa Teknik

Technical Engineering

Untuk kegiatan rekayasa teknik, BKI melakukan perhitungan teknik dan desain appraisal. Proyek yang ditangani adalah :

In technical engineering sector, BKI makes technical calculation and design appraisal. Projects so handled are:

TYPES OF PRODUCTION ACTIVITIES	ACTIVITY
- Design appraisal and Supervision Mooring System	8
- Design appraisal and supervision Platform	5
- Ship design	7

Inspeksi & supervisi maritim

Maritime Inspection & Supervision

Untuk kegiatan inspeksi dan supervisi marine, BKI telah menangani Survey Kondisi (pemeriksaan propeler, inventarisasi sistem perawatan kapal, evaluasi hasil pekerjaan perbaikan kapal), Perhitungan stabilitas & trim kapal, Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, Kalibrasi tangki, On/Off Hire Survey, Pembuatan gambar teknik, Penyusunan Hatch Cover Plan, Penyusunan Cargo Securing Manual dan Penyusunan Manual ISM Code.

In marine inspection and supervision sector, BKI handles Condition Surveys (propeller inspection, marine maintenance system, marine repair result evaluation), Marine stability & trim calculation, Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, Tank Calibration, On/Off Hire Survey, Technical drawings making, Hatch Cover Plan Preparation, Cargo Securing Manual Preparation and ISM Code Manual Preparation.



MARINE SURVEY & SUPERVISION SERVICE	ACTIVITY
- Ship Survey Condition	335
- Bollard Pull Test	23
- Inclining Test	14
- Merger Test	138
- On Hire Survey / Off Hire Survey	78
- Draft Survey	2
- Towing Tank	4
- Gas Free Inspection	1
- Ship Loading Tank Calibration	17
- Ship Speed Trial	1
- Supervision of Ship Fabrication	4
- Drawing of Ship	27
- Stability of Ship	71

MARINE CONSULTANT SERVICE	ACTIVITY
- ISM Manual System (DOC & SOC)	7
- Standard Operating Procedure (SOP)	4





Pelatihan publik *Public Training*

Disamping itu, BKI juga melakukan pelatihan teknik yang secara rutin diselenggarakan, baik dalam public training maupun in-house. Pelatihan yang diselenggarakan adalah :

In addition, BKI also holds routine technical trainings both in public trainings and in-house trainings. The trainings are:

TYPES OF TRAININGS	ACTIVITY
- Internal Safety Auditor Course for ISM Code	13
- Marine Surveyor Course	4
- Internal Security Auditor Course for ISPS Code	12
- Welding Inspector Course	3
- Rigger Course	2
- Crane Operator Course	4
- Sea Survival Training Course	2
- Port State Control Course	2





Pengembangan Sumber daya Manusia Human Resources Development

Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten merupakan tulang punggung BKI dalam menghadapi persaingan bisnis dan upaya meningkatkan kepercayaan. Prestasi perusahaan yang telah dicapai sangat ditunjang oleh kompetensi dan profesionalisme SDM, yang merupakan hasil dari program pengembangan SDM selama tahun 2007. Peningkatan prestasi tersebut antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan produktivitas, sehingga Man Power Productivity (MPP) meningkat 9.2 % dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 338,55 juta per personil. Sampai dengan 31 Desember 2007, BKI memiliki personil sebanyak 485 orang.

BKI menyadari sepenuhnya bahwa Human Resources adalah bagian paling penting yang harus dimaintain dan ditingkatkan kompetensinya. Dalam tahun 2007, biaya training yang dipergunakan mencapai 10,6 % dari total biaya karyawan. Khusus untuk training bagi Surveyor, BKI telah memiliki Program Diklat Surveyor Terpadu sesuai dengan ketentuan IACS-QSCS. Sampai dengan Desember 2007, kompetensi personil yang dimiliki adalah:

The reliable and competent of human resources are highly required by BKI to encounter business competition and improve the trust. The company performance is highly supported by competence and professionalism of human resources, being the result of human resources development program during 2007. The improvement of the performance are among others indicated in the improvement of productivity, so that Man Power Productivity (MPP) increases 9.2 % than that in the last year to Rp. 338.55 million per employee. Until December 31, 2007, BKI has 485 employees.

BKI fully realizes that Human Resources is the most important part of which the competence should be maintained and improved. In 2007, training expense was 10.6 % of total employee expense. For Surveyor training, BKI has implemented Integrated Surveyor Training Programme pursuant to IACS-QSCS. Until December 2007, personnel competence are:

Principal Surveyor (Class)	15	Crane Inspector (Depnaker)	54
Senior Surveyor (Class)	52	Crane Inspector (Migas)	23
Surveyor (Class)	59	Pipeline Inspector	15
Assistant Surveyor (Class)	18	Offshore Pipeline Inspector	9
Inspector	125	Casing & Tubing Inspector	10
Radiography Expert Level I	8	Tank Storage Inspector	21
Radiography Expert Level II	3	Radiation Protection Officer	5
NDT Level I	4	Cathodic/Corrosion Inspector	24
NDT Level II	27	Safety Auditor	114
Welding Inspector	143	Quality Auditor	52
Welding Inspector – AWS	3	Security Auditor	76
Boiler/PV Inspector (Depnaker)	37	Information Technology Specialist	7
Boiler/PV Inspector (Migas)	28		



Dalam meningkatkan pelayanan jasa dan percepatan proses reporting, BKI telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dengan mengembangkan beberapa aplikasi baik untuk perkantoran maupun aplikasi perhitungan teknik.

BKI telah mengembangkan Website sebagai bagian integral dari pelayanan prima bagi pemakai jasa dengan akses informasi 24 jam secara on-line. Pemakai jasa dengan otorisasi yang diberikan dapat mengakses status survey / audit armada kapalnya. Demikian pula dapat di download semua Rules & Regulation, publikasi BKI, form aplikasi, termasuk Owner's Guide.

BKI juga telah mengembangkan sistem komputerisasi terpadu untuk penanganan survey klasifikasi dan statutoria, mulai dari permohonan survey hingga penerbitan sertifikat. Penyempurnaan aplikasi ini disebut Classification Operation System (COPs). Dengan penerapan aplikasi COPs ini memberikan benefit dalam mempercepat proses permohonan survey, aktivitas survey, survey report, proses sertifikasi hingga invoicing. Hal ini menunjukkan komitmen BKI untuk terus melakukan improvement yang fokus kepada pemakai jasa dalam rangka mewujudkan kepuasan pelanggan.

BKI juga telah melakukan uji coba sistem komputerisasi terpadu untuk penanganan sistem finansial dan akuntansi yang dapat diakses secara on-line antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Aplikasi tersebut disebut Financial Operating System (FinOpS) dan diharapkan aplikasi ini akan efektif diterapkan tahun 2008. Dengan penerapan aplikasi ini memberikan benefit dalam mempercepat proses penyajian laporan keuangan dan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan komitmen BKI untuk terus melakukan improvement yang fokus kepada peningkatan kinerja perusahaan.

Baik Website BKI, aplikasi COPs maupun aplikasi FinOpS sepenuhnya dikembangkan sendiri oleh ahli-ahli teknologi informasi yang dimiliki BKI.

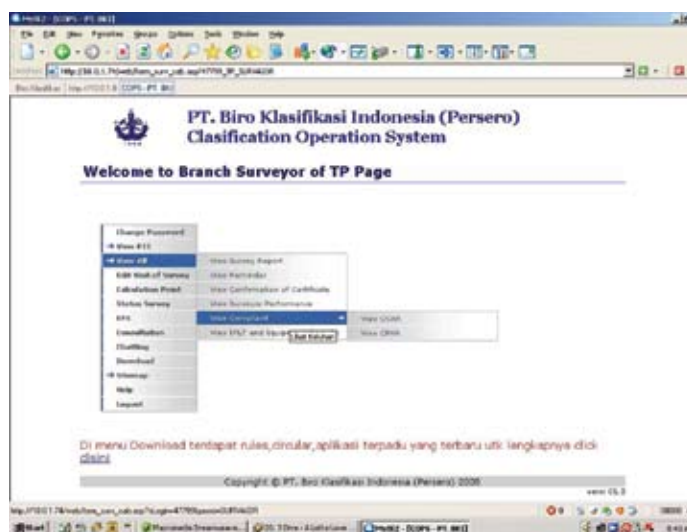
In improving the services and acceleration of report processing, BKI has developed Management Information System by developing some applications both for offices and also for technical calculation.

BKI has launched its website as an integral part of its prime services to our customers with information access for 24 hours on-line. With the authorization, the customers can access survey / audit status of their ship fleet. All Rules & Regulation, BKI publications, application forms, including Owner's Guide can also be downloaded.

BKI has also developed an integrated computerization system to handle survey classifications, starting from request for survey through issue of certificate. This application improvement is called Classification Operation System (COPs). The application of this COPs benefits the customers to accelerate survey request process, survey activity, survey report, certification process through invoicing. It indicates BKI commitment to continuously making an improvement focusing on the customers in the framework of satisfying of the customer.

BKI has also tested an integrated computerization system to handle financial and accounting system that able to access between Head Office and Branch Office in on-line basis. This application is called Financial Operating System (FinOpS) and expected this application will fully implemented in year 2008. The benefits of implemetation of this application to accelerate financial reports and financial information for decision makers. It indicates BKI also commitment to continuously making an improvement of its corporate performance.

All of BKI Website, COPs application and FinOpS application are fully developed by BKI's IT expert.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Tata Kelola Perusahaan yang baik juga menjadi sarana perusahaan mengembangkan aset, akuntabilitas kepada para stakeholder dan menjaga nilai jangka panjang stakeholder.

Panduan Dewan Board Manual

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. RUPS berhak memperoleh seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan dan meminta pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan. Pada tahun 2007, Perusahaan telah mengadakan RUPS pengesahan RKAP pada tanggal 27 Desember 2006 di Jakarta dan RUPS pertanggung jawaban Laporan Manajemen tahun 2006 pada tanggal 29 Juni 2007 di Jakarta.

Komisaris

Komisaris bertugas mengawasi tindakan dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Komisaris telah memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris telah mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

Pada tahun 2007, Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya yang antara lain adalah membahas dan memberi pengesahan RKAP dan RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, memberi saran-saran kepada Direksi dalam melaksanakan RKAP 2007. Tugas Komisaris lain yang juga telah dilaksanakan adalah meminta penjelasan dari Direksi mengenai perkembangan kinerja korporasi pada setiap periode triwulanan, membahas penyusunan dan memberi persetujuan GCG Manual, membentuk Komite Audit, memberi persetujuan atas perubahan anggaran dan investasi yang diajukan Direksi, mengusulkan dalam RUPS dalam penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2007, membahas laporan Komite Audit serta mengadakan rapat koordinasi dengan Direksi terhadap pengelolaan perusahaan.

Good Corporate Governance application mostly benefits the Company performance on the whole. Good Corporate Governance also becomes a tool for the company to develop the assets, accountability to the stakeholders and maintain its long-term values.

General Meeting of Shareholders

General Meeting of Shareholders is the Company's Organ with the highest power in the company and with all authorities not delegated to Board of Directors or Board of Commissioners. General Meeting of Shareholders is entitled to obtain all relevant information on the Company and request for accountability of Board of Directors and Board of Commissioners relating to Company management. In 2007, the Company held a General Meeting of Shareholders to ratify RKAP on December 27, 2006 in Jakarta and General Meeting of Shareholders on accountability of Management Report of 2006 on June 29, 2007 in Jakarta.

Board of Commissioners

Board of Commissioners is assigned to supervise the actions of and give inputs to the Board of Directors in the interest of the Company, Shareholders, as well as the relevant parties in general. Board of Commissioners has ensured that the Board of Directors is capable of performing its tasks in any condition whatsoever. Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of decision making policy and process by the Board of Directors to always comply with the Company's purposes and the Shareholders' directions. In implementing its tasks, the Board of Commissioners has complied with the applicable Articles of Association and law and legislation.

Implementation of Tasks and Responsibilities of Board of Commissioners

In 2007, the Board of Commissioners has implemented its tasks and responsibilities, among others discussing and ratifying RKAP and RKA of Environmental Partnership and Development, giving advices to the Board of Directors in implementing RKAP 2007. Any other tasks of the Board of Commissioners already implemented are inquiring the explanation from the Board of Directors on corporate performance progress quarterly, preparing and approving GCG Manual, forming Audit Committee, approving the change of budget and investment submitted by the Board of Directors, proposing the assignment of Public Account's Office in a General Meeting of Shareholders to audit Consolidated Financial Statement of Budgetary Year 2007, discussing Audit Committee reports as well as holding coordination meetings with the Board of Directors in case of company management.

Remunerasi Komisaris

Remunerasi yang diberikan kepada Komisaris atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan Perusahaan. Sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 29 Juni 2007 di Jakarta, besarnya remunerasi Komisaris adalah sbb :

No	Name	Monthly Remuneration		Annual Tantiem
		Honorarium	Transport Allowance	
1.	Capt Albert Lopian	6,983,000,-	1,397,000,-	47,510,000,-
2.	Drs.Budiarso Teguh Widodo	6,285,000,-	1,257,000,-	42,759,000,-
3.	Drs.Achmad Chotibudin, MM	6,285,000,-	1,257,000,-	42,759,000,-

Efektifitas Kerja Komisaris

Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan rapat komisaris diambil dengan suara terbanyak. Setiap anggota Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Komisaris yang diwakilinya.

Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah rapat yang dibuat ditanda-tangani ketua rapat dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Setiap anggota Komisaris telah menerima salinan risalah rapat Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pada tahun 2007, Komisaris melakukan rapat sebanyak 11 kali dengan prosentase kehadiran sbb :

- Capt Albert Lopian (Komisaris Utama) : 100 %
- Drs. Budiarso Teguh Widodo (Komisaris) : 91 %
- Drs. Achmad Chotibudin, MM (Komisaris) : 100 %

Disamping rapat internal tersebut, Komisaris juga melakukan rapat koordinasi dengan Direksi sebanyak 7 kali.

Remuneration to the Board of Commissioners

Remuneration to the Board of Commissioners for their Company management and supervision shall pursuant to Resolution of General Meeting of Shareholders on June 29, 2007 in Jakarta be as follows:

Effective Work of Board of Commissioners

Board of Commissioners shall hold a meeting once a month and at any time if considered necessary to discuss various Company problems and businesses as well as evaluate the Company performance. Summons to a meeting of Board of Commissioners shall be made in writing by the President Commissioner or a member of Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and contain meeting agenda, date, time and venue.

All meetings of Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner. All resolutions shall be adopted amicably. In case of failure to attain an amicable resolution, resolution in a meeting of board of commissioners shall be adopted with the majority of votes. Each member of Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for a member of Board of Commissioner he represents.

Minutes of meeting describing the developing situation, decision making process, agumentations put forward, conclusions taken, and objections to meeting conclusions in case of difference of opinion shall be drawn up in each meeting of Board of Commissioners. The meeting of meeting shall drawn up and signed by a member of Board of Commissioners appointed by and from among those present. each member of Board of Commissioners has received copy of minutes of meeting of Board of Commissioner despite his absence in the meeting.

In 2007, the Board of Commissioners held meetings for 11 times with the following percentage of presence:

- Capt Albert Lopian (President Commissioner) : 100 %
- Drs. Budiarso Teguh Widodo (Commissioner) : 91 %
- Drs. Achmad Chotibudin, MM (Commissioner) : 100 %

In addition to the internal meetings, the Board of Commissioners also held coordination meetings with the Board of Directors for 7 times.



Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan dengan SK Komisaris Utama No: DU.105/LT.101/KI-07 tanggal 31 Juli 2007 menyebutkan, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris.

Susunan Komite Audit adalah :

Ketua : Drs. Achmad Chotibudin, MM.
Anggota : H.M Masrie Simatupang.
Supono.

Ketua Komite Audit adalah juga Komisaris, sedangkan anggota Komite Audit adalah independen sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomer Per-05/MBU/2006. Sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Audit bahwa Komite Audit mengadakan rapat internal minimal 1 bulan sekali dan hasil pembahasan dituangkan dalam risalah rapat. Selama tahun 2007, Komite Audit telah mengadakan rapat internal sebanyak 12 kali dengan topik pembahasan yang bervariasi sesuai kebutuhan perusahaan.

Direksi

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, telah mengurus dan mengelola bisnis untuk kepentingan Perusahaan yang sebesar-besarnya. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan. Direksi telah bertindak secara transparan, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi telah menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

Direksi mempunyai tugas utama :

- Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
- Menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang sehat dalam perusahaan.
- Bertugas sesuai anggaran dasar Perusahaan keputusan RUPS serta peraturan lainnya.
- Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Remunerasi Direksi

Remunerasi yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan Perusahaan. Sesuai dengan Keputusan RUPS yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2007 di Jakarta, adalah sebagai berikut :

No	Name	Monthly Remuneration		Annual Tantiem
		Honorarium	House Allowance	
1.	Ir. Muchtar Ali	17,457,000,-	5,238,000,-	108,775,000,-
2.	Drs. Donny S. Purba	15,712,000,-	4,714,000,-	106,897,000,-
3.	Ir. Haryanto	15,712,000,-	4,714,000,-	106,897,000,-
4.	Ir. Wibisono	15,712,000,-	4,714,000,-	106,897,000,-

Audit Committee

Audit Committee shall, as contained in Audit Committee Charter stipulated by virtue of Decision of the President Commissioner No: DU.105/LT.101/KI-07 dated Juli 31, 2007, be assigned and responsible for giving opinions to the Board of Commissioners in relation to any reports and anything submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying anything requiring the attention of the Board of Directors and implementing any other tasks relating to the tasks of the Board of Commissioners.

Composition of Audit Committee :

Chairman : Drs. Achmad Chotibudin, MM.
Member : H.M Masrie Simatupang.
Supono.

Chairman of Audit Committee shall also be a Commissioner, while member of Audit Committee shall be independent in accordance with the criteria in Regulation of the State Minister for State-Owned Corporations Number Per-05/MBU/2006. Audit Committee Charter stipulates that Audit Committee shall hold an internal meeting at least once a month and the meeting resolution shall be drawn up in a minutes. During 2007, Audit Committee held internal meetings for 12 times with variant topics in accordance with the company's needs.

Board of Directors

The Board of Directors has managed and administered the businesses in the utmost interest of the Company with a good faith and full of responsibility. In implementing the tasks, the Board of Directors remains taking into account the balance of interest of all relevant parties to the Company's activities. the Board of Directors has acted transparently and carefully and considered various relevant significant aspects. the Board of Directors has used the Company's authorities and resources only in the interest of the Company.

The Board of Directors shall be mainly assigned to:

- Lead and manage the company in accordance with the aims and intentions of the company.
- Improve the company efficiency and effectiveness.
- Apply good corporate governance practices in the company.
- Work in accordance with the Company's articles of association, resolutions of general meetings of shareholders and any other regulations.
- Be responsible to shareholders through General Meeting of Shareholders.

Remuneration to the Board of Directors

Remuneration to the Board of Directors for their Company management and supervision shall pursuant to Resolution of General Meeting of Shareholders on June 29, 2007 in Jakarta be as follows:



Selain remunerasi diatas kepada Direksi juga diberikan fasilitas kendaraan dinas operasional masing-masing 1 (satu) unit sesuai dengan azas kepastan dan kemampuan perusahaan.

Efektifitas Kerja Direksi

Secara umum efektifitas dan kinerja Direksi berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Pencapaian kinerja perusahaan telah melampaui target yang ditetapkan Pemegang Saham dalam Key Performance Indicator (KPI).

Direksi telah mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan. Dalam panggilan rapat tersebut telah mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Pada tahun 2007, Direksi melakukan rapat internal sebanyak 15 kali dan melakukan rapat koordinasi dengan Komisaris sebanyak 7 kali, dengan prosentase kehadiran sbb:

• Ir. Muchtar Ali	: 100 %
• Drs. Donny S.Purba	: 100 %
• Ir. Haryanto	: 100 %
• Ir. R. Wibisono, MM	: 100 %

Hubungan Kerja antara Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat koordinasi untuk membicarakan masalah perusahaan yang relevan. Dalam setiap pertemuan, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Komisaris telah diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Komisaris memahami permasalahan yang akan dibahas.

Dalam setiap Rapat tersebut telah dibuat risalah rapat yang menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Selama tahun 2007, Direksi dan Komisaris telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 7 kali.

Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Satuan Pengawasan Intern (SPI), setiap pemeriksaan dilaporkan kepada Direktur Utama dan selanjutnya disampaikan kepada Komisaris sebagai bahan evaluasi dan kajian Komisaris dan Komite Audit.

In addition to the remuneration, each member of the Board of Directors shall also be provided with 1 (one) unit of operational official vehicle facility in accordance with the company's properness and capability principles.

Effective Work of the Board of Directors

In general, the Board of Directors's effectiveness and performance shall be based on the tasks and obligations contained in the applicable law and legislation, the Company's Articles of Association and the Shareholders' instructions. The attainment of the company's performance has exceeded the target determined by the Shareholders in Key Performance Indicator (KPI).

The Board of Directors shall hold meetings once a month and at any time if considered necessary by one or more members of the Board of Directors. Summons to a meeting of Board of Directors shall be made in writing by a member of Board of Directors eligible to represent the Company. The summons to the meeting shall contain meeting agenda, date, time and venue. In 2007, the Board of Directors held internal meetings for 15 times and coordination meetings for 7 times, with the following percentage of presence:

• Ir. Muchtar Ali	: 100 %
• Drs. Donny S.Purba	: 100 %
• Ir. Haryanto	: 100 %
• Ir. R. Wibisono, MM	: 100 %

Work Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors

Board of Commissioners and Board of Directors held coordination meetings to discuss the company's problems. All significant information and data were given in writing to the Board of Commissioners before the meeting to guarantee the availability of time to the Board of Commissioners to understand the problems to discuss.

Minutes of meeting describing the developing situation, decision making process, agumentations put forward, conclusions taken, and objections to meeting conclusions in case of difference of opinion shall be drawn up in each coordination meeting. during 2007, the Board of Directors and the Board of Commissioners held coordination meetings for 7 times.

In case of Audit Results (LHP) and Certain Audit Results Report from Internal Control Unit (SPI), each audit shall be reported to the President Director and further submitted to the Board of Commissioners for evaluation and study by the Board of Commissioners and Audit Committee.

Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya menjaga aset dari penyalah-gunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan Perusahaan maupun yang dipublikasikan.

Pelaksanaan tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja. Perusahaan telah menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu perusahaan juga membentuk Satuan Jaminan Mutu (Satjamtu) sebagai penanggung jawab diterapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2000 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (Customer satisfaction) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (Continuous Improvement).

Dalam mendukung aktivitas pengendalian internal, Perusahaan senantiasa menjamin independensi SPI dan Satjamtu dalam melaksanakan internal audit serta meningkatkan kompetensi para auditornya. SPI selama tahun 2007 telah melakukan audit keuangan dan operasional terhadap 19 (sembilan belas) unit kerja, sedangkan Satjamtu telah melakukan audit pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu terhadap 32 Unit kerja, meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi.

Auditor Eksternal

Dalam rangka penunjukan auditor eksternal, Perusahaan telah melakukan mekanisme dimana Direksi mengusulkan calon auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) kepada Komisaris dan selanjutnya Komisaris mengajukan calon auditor eksternal terpilih kepada Pemegang Saham untuk disyahkan dalam RUPS.

Auditor eksternal yang ditunjuk adalah bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta perusahaan telah menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasaan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Auditor Eksternal telah melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan memberikan pendapat secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standard Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan RUPS tahunan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Wisnu B. Soewito & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2007. Besarnya jasa audit yang dibayarkan Perusahaan untuk laporan keuangan tahun 2007 yaitu Rp. 88.000.000,- termasuk PPN 10%. Kantor Akuntan Wisnu B. Soewito & Rekan tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan.

Integritas dalam berusaha

Perusahaan telah menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip GCG. Perusahaan telah mensosialisasikan GCG Code kepada seluruh karyawan untuk mempertahankan kejujuran, integritas, pertanggung-jawaban, independensi dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing.

Internal Control System

The Company has owned an internal control system to secure the reliability of accountancy system. The internal control system is applied to properly secure and maintain the assets from misuse and illegal transfer of ownership, maintain the validity of accountancy records and the reliability of financial information used by the Company or published to the public.

All work units shall be responsible for implementing internal control tasks. The Company has determined the Internal Control Unit as the unit responsible for the effectiveness of internal control system. In addition, the company also forms a Quality Guarantee Unit responsible for applying Quality Management System based on ISO 9001-2000 standard requirements as the realization of the Company's commitment to customer satisfaction and continuous improvement.

To support the internal control activities, the Company shall always guarantee the independence of Internal Supervisory Unit and Quality Guarantee Unit in implementing internal audit and improve the competence of their auditors. During 2007, Internal Supervisory Unit has performed financial and operational audits to 19 (nineteen) work units, while Quality Guarantee Unit has audited the implementation of Quality Management System in 32 Work units, covering Head Office and Production Units.

External Auditor

In the framework of assigning an external auditor, the Company has implemented a mechanism where the Board of Directors proposes the prospective external auditor (Public Accountant's Office) to the Board of Commissioners and the Board of Commissioners shall further propose the selected prospective external auditor to Shareholders for ratification in a General Meeting of Shareholders.

The external auditor so assigned shall be free from the influence of the Board of Commissioners and the relevant parties in the Company, and the company shall provide all accountancy records and supporting data required by the external auditor thereby enabling the external auditor to express opinion on properness. The Company's financial statement shall be in consistence and in compliance with Indonesian Financial Accountancy Standards. The external Auditor has audited the Company's financial statement and given its opinion on properness and compliance of the Company's financial statement with Financial Accountancy Standards and the applicable law and legislation.

Annual General Meeting of Shareholders has assigned Public Accountant's Office Wisnu B. Soewito & Partners to audit the Company's financial statement of 2007. The audit service paid by the Company for the financial statement of 2007 shall amount to Rp. 88,000,000,- including VAT of 10%. Public Accountant's Office Wisnu B. Soewito & Partners shall not provide the company with any other consultancy services

Integrity in running business

The Company has applied the standards of ethics in all business activities based on GCG principles and socialized GCG Code to all employees to maintain the honesty, integrity, accountability, independence and justice in work processes and transactions within the respective units.

Perusahaan juga telah menerapkan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan ilegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, perdata atau pidana. Menjadi kewajiban setiap unit kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan melarang Komisaris, Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan dan pihak terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan perundang-undangan dan prinsip GCG. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung dikenai sanksi administratif dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku.

Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan telah melakukan hubungan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan telah berusaha memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham. Perusahaan telah melakukan usaha terjadinya pertumbuhan yang berkesinambungan sesuai dengan sasaran Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Hubungan dengan Pejabat Negara

Adalah kebijakan Perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pejabat Negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perusahaan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan

Perusahaan telah mengambil tindakan preventif untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan telah menyediakan fasilitas kerja yang memadai agar karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut Perusahaan telah memastikan bahwa asset, lokasi kerja serta fasilitas lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Perusahaan juga telah melengkapi alat, sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja agar seluruh surveyor dan inspektor dapat bekerja aman dan selamat. Dalam prakteknya, Perusahaan memiliki HSE (Health, Safety & Environment) Manual sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian aspek Kesehatan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Kerja. Dalam tahun 2007 tercatat zero accident terhadap pekerjaan yang dilakukan surveyor atau inspektor BKL.

Proses Pengadaan Barang / Jasa dan Hubungan dengan Rekanan

Perusahaan telah menerapkan proses pengadaan sesuai prinsip GCG, antara lain menjunjung prinsip keterbukaan, kompetitif, fair dan dapat dipertanggung jawabkan. Perusahaan telah memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tersebut diatas. Proses pengadaan juga telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rekanan untuk berkompetisi dalam proses pengadaan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka.

The Company has also applied the supervisory functions based on the correct and generally applicable principles as well as always exerted its best that any illegal, unfair acts and violation of the applicable regulations can be sanctioned, both administrative sanction and civil and criminal sanction. Each work unit shall always follow-up each finding result submitted by the supervisory functions.

The Company has stipulated a policy that prohibits the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and all employees and the relevant parties from making any transaction in contravention of the law and legislation and GCG principles. In case the transaction proves to occur, each directly involved party shall be subject to an administrative sanction and prosecuted pursuant to the applicable law.

Rapport with Shareholders

The Company has made rapport with Shareholders pursuant to the applicable law and legislation and exerted its best to give the optimum and continuous contribution to Shareholders. The Company has also exerted a continuous growth in accordance with Key Performance Indicator (KPI) target determined by the Shareholders.

Rapport with the State's Officials

The Company's policies shall be developing and maintaining kind rapport and effective communication with the State's Officials competent to the Company's operation within the limits of tolerance permitted by the law.

Occupational Safety and Health as well as Environmental Conservation

The Company has taken preventive actions to avoid accidents and health disruption at place of work and provided sufficient work facilities so that all employees obtain a safe and healthy place of work. To that end, the Company has ensured that the assets, work locations and any other facilities fulfill the applicable law and legislation relating to occupational health and safety requirements as well as the environmental conservation.

The Company has also furnished occupational safety and health tools, facility and equipment so that all surveyors and inspectors can work safely. In practice, the Company has HSE (Health, Safety & Environment) Manual as a reference in the implementation and control of Occupational Health, Safety and Protection. In 2007, BKL surveyors and inspectors recorded zero accident of work.

Goods / Service Procurement Process and Rapport with Partners

The Company has applied GCG principles in a procurement process, among others revering the transparency, competitive, fair and accountable principles and had clear and written regulations to guarantee that the goods and service procurement takes place pursuant to the applicable law and legislation and the above principles. The procurement process has also given the utmost benefit to the Company and the same opportunity to all partners to compete in a procurement process in accordance with their capability and experiences.

Dalam pemilihan rekanan tidak diperbolehkan menunjuk rekanan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, pejabat ataupun personil di BKI. Selain itu dalam pemilihan barang atau rekanan, telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mempergunakan produk Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangan aspek kualitas, aspek finansial ekonomis serta selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar

Perusahaan telah berkomitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi hubungan baik dengan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan telah melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat dengan cara yang wajar dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan. Kegiatan ini antara lain adalah Bantuan Kemitraan, Bhakti Sosial, Bantuan Korban Bencana Alam serta pemberian Bea Siswa.

Penerapan Teknologi

Sebagai badan klasifikasi yang independen dan dalam rangka meningkatkan reputasinya, Perusahaan memiliki misi melakukan penelitian dan pengembangan peraturan dan standar teknik, khususnya dibidang teknik perkapalan dan kelautan. Dalam mengemban misi tersebut, Perusahaan telah melakukan upaya dalam mengembangkan dan mengadopsi teknologi atau standar yang diakui untuk dipergunakan dalam Rules & Regulation BKI serta mempublikasikannya untuk dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan (galangan kapal, Pemerintah, pemilik kapal, asuransi, konsultan teknik dsb) disamping sebagai acuan bagi BKI dalam melakukan pelayanan jasa survey dan sertifikasi.

Penerapan Teknologi Informasi juga telah dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan percepatan proses produksi dan pelaporan, meliputi operasional, keuangan dan personalia.

Manajemen Risiko

Perusahaan telah menyadari sepenuhnya bahwa operasi Perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada diluar kendali. Perusahaan telah melakukan kendali dan meminimalkan risiko yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko yang bersifat eksternal, Perusahaan berusaha mengidentifikasi secara seksama dan mengevaluasi peluang terjadinya dan dampaknya terhadap Perusahaan. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan telah melakukan upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, dengan merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal Perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik analisis keuangan tertentu sedemikian rupa sehingga resiko yang mungkin timbul tidak mengurangi nilai Perusahaan secara drastis. Namun demikian, Perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya internal.

Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Kebijakan Perusahaan telah menetapkan untuk mengendalikan data dan catatan secara akurat, mudah dilacak dan teridentifikasi terhadap semua aktivitas usaha dan operasional Perusahaan serta senantiasa dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan dan transaksi lainnya telah merefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. Semua data dan catatan telah diungkapkan secara penuh kepada auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Partners that can result in conflict of interest with the Board of Commissioners, Board of Directors, officials and personnel of BKI shall not be selected. In addition, domestic products and partners shall be mostly selected by remaining considering the quality, financial and economic aspects and as long as not contravening the law and legislation.

Partnership with the Community Surroundings

The Company has committed that the Company shall anywhere the Company operates maintain kind rapport with the community surroundings being the basic principle of the long term success of the Company and properly made a direct interaction with the community surroundings by taking into account the company's capability and the applicable provisions. The Company respects any partnership activity giving a contribution to the community and improving the Company's social values. The activities shall be among others Partnership Assistance, Social Service, Aid to Natural Disaster Victims, and Scholarship Assistance.

Technological Application

As an independent classification agency and in the framework of improving its reputation, the Company has missions to make technical regulation and standard research and development, particularly in shipping and marine engineering sector. To that end, the Company has taken various efforts to develop and adopt the acknowledged technology or standard for perusal in BKI Rules & Regulation BKI as well as publish the same for perusal by the relevant parties (shipyard, the Government, ship owner, insurance, engineering consultant, etc) in addition to serving as a reference to BKI in providing survey and certification services. Information Technology Application has also been developed in the framework of improving the service and accelerating the production and reporting processes, covering the operation, finance and personnel.

Risk Management

The Company has fully realized that the Company's operation is not free from various risks, both those under the Company's control and those beyond the Company's control. The Company has controlled and minimized the internal risks by applying prudential principles and risk management principles. In case of external risks, the Company exerts its best to accurately identify and evaluate their occurrence and impact on the Company. Based on the identification, the company has taken the necessary measures to minimize the risks by planning contracts in such a way so that the Company can legally be protected from any unnecessary risks or by making certain financial analysis techniques in such a way so that any possible risks do not drastically reduce the Company's values. However, the Company also realizes the risks beyond the Company's control whose impact can not be minimized by the internal efforts.

Company Data and Information Confidentiality

The Company has stipulated policies of controlling accurate, accessibly and identified data and records to all business and operational activities of the Company and always maintaining the same at any time. Each payment, transfer of ownership, service settlement and any other transactions have reflected fully and in details in accountancy system. All records and data have been fully revealed to the internal and external auditors in compliance audit and any other investigations.

Kebijakan Perusahaan juga melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak ketiga. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan Direksi.

Keterbukaan Informasi

Perusahaan telah mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perusahaan menyampaikan informasi kepada khalayak umum, antara lain, melalui Website (www.klasifikasiindonesia.com), Customer Meeting, Pertemuan Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I), Presentasi, BUMN online, Brosur, Company Profile, Annual Report dan Promosi di sejumlah media massa.

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Seluruh jajaran BKI yang berkaitan dengan tugas pemasaran, drawing approval, pelaksanaan survey dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontrak / perjanjian dan administrasi keuangan termasuk akuntansi, telah menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pihak lain atau yang digunakan oleh Perusahaan. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana, perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan dan karyawannya.

Karyawan dan Hubungan Industrial

Perusahaan mempunyai jaringan kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah dengan latar belakang agama, budaya, tradisi, adat istiadat serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan GCG.

Direksi telah memperlakukan karyawan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan agama, suku, asal-usul, kelompok, jenis kelamin dan hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja dan indikator lain yang bersifat objektif.

Perusahaan telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai karyawan dan hubungan industrial, antara lain :

- Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi karyawan.
- Melindungi karyawan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- Memberikan hak kepada karyawan untuk berkumpul dan berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri sejalan dengan kompetensi yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan baik saat ini maupun masa yang akan datang.
- Mengusahakan skema remunerasi yang diterima karyawan, secara umum mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perusahaan.
- Memberikan bonus dan insentif prestasi kepada karyawan sesuai kinerjanya.
- Senantiasa bermitra dengan Serikat Pekerja yang diakui dalam lingkungan Perusahaan.

The Company's policies also prohibit the Board of Commissioners, Board of Directors and employees to reveal any confidential information on the Company or customers to any third parties. Considering that the revelation of the confidential information can harm the Company or customers and benefit any other parties, the revelation of confidential information shall according to the need be approved by the Board of Directors.

Information Transparency

The Company has revealed any significant information in Annual Report to the Shareholders and the relevant Government agencies pursuant to the applicable law and legislation timely, accurately, obviously and objectively.

The Company gives the information to the public by among others Website (www.klasifikasiindonesia.com), Customer Meetings, Indonesia Classification Consultancy Committee (K3) Meetings, Presentations, State-Owned Corporations onlines, Brochures, Company Profile, Annual Report dan Promotions in number of mass media.

False Statements, False Claims, and Conspiracy

All BKI staff relating to marketing, drawing approval, survey and inspection, certification process, entering into of contracts/agreements and financial administration including accountancy have realized the significance of making accurate statements and correct claims to the Management, the Government and any other parties or used by the Company. It covers any oral or written statements given to any other parties or used by the Company. Any personnel and any other conspiring persons including the Company's work partners and employees negligently giving incorrect or misleading statements or claims can be subject to administrative, criminal, civil punishments.

Employees and Industrial Relations

The Company shall have branch offices operating in various regions with the different religions, cultures, customs and traditions, and regulations. Despite the sensitiveness to the difference, the Company remains applying the principles based on GCG provisions.

The Board of Directors has treated its employees fairly and free from biases due to difference of religions, ethnics, origins, groups, genders and anything not relating to performance and any other objective indicators.

The Company has applied several employees and industrial relations policies, among others:

- *Providing the employees with good and safe work condition.*
- *Protecting the employees from any possibilities endangering the safety and health at place of work.*
- *Giving the rights to the employees to gather and unite pursuant to the applicable law and legislation.*
- *Giving the opportunity to the employees to participate in any educations, trainings, and self development in line with the competence of the relevant persons as well as in accordance with the Company's needs in the present and in the future.*
- *Making a remuneration scheme acceptable to the employees pursuant to the applicable regulation/provisions and in accordance with the Company's capability.*
- *Providing the employees with bonuses and incentives in accordance with their work performance.*
- *Always making a partnership with an acknowledged Labor Union within the Company.*

Direksi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak tegas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menjunjung prinsip GCG terhadap karyawan yang terbukti menimbulkan keresahan, melanggar norma disiplin karyawan, dan merusak suasana kerja.

Karyawan juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan, antara lain :

- Setiap karyawan wajib mentaati Peraturan Pokok Kepegawaian (Perpok), Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan.
- Setiap karyawan wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.
- Setiap karyawan wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.
- Setiap karyawan wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan.
- Setiap karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada karyawan di lingkungan kerjanya.

Benturan Kepentingan

Perusahaan telah mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi terjadinya pertentangan kepentingan pribadi Komisaris, Direksi, atau karyawan dengan kepentingan Perusahaan. Benturan ini dapat melibatkan kepentingan pemakai jasa, instansi lain yang berkepentingan dengan jasa BKI, rekanan, karyawan atau bahkan anggota masyarakat di tempat Perusahaan beroperasi.

Prinsip utama yang telah diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan adalah tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau untuk kepentingan orang dan atau pihak lain yang terkait. Juga menghindari setiap aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Aktivitas tersebut tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan citra dan reputasi Perusahaan.

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survey / Inspeksi

BKI sebagai Perusahaan yang memprioritaskan aspek keselamatan telah menyadari bahwa hasil survey, laporan dan sertifikat yang diterbitkan mempunyai implikasi terhadap aspek keselamatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik kapal, pemilik cargo, asuransi, galangan, penumpang, awak kapal, Pemerintah, dan masyarakat umum secara luas.

Untuk itu seluruh jajaran Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Satuan, Kepala Cabang dan Wakilnya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Surveyor, Inspektur dan staf teknik Kantor Pusat telah menjaga independensinya dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, keputusan hasil survey / inspeksi, dan pembuatan laporan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pertimbangan aspek keselamatan adalah mutlak menjadi prioritas utama dengan mengacu peraturan dan regulasi yang berlaku.

Benturan Kepentingan dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa

Komisaris, Direksi dan Karyawan dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai andil atau kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial tertentu.

Komisaris, Direksi dan Karyawan juga dilarang meminta atau menerima uang, pemberian/hadiah atau hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemasok yang berkompetisi. Demikian juga dilarang memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan dan sebaliknya.

The Board of Directors shall be fully authorized to take firm actions pursuant to the applicable regulation by revering GCG principles to any employees proving to result in restlessness, violate disciplinary norms, and damage the work atmosphere.

Each employee shall:

- *Adhere to Principal Regulation on Personnel Affairs, the Company's Values and all regulations issued by the Company.*
- *Give priority to the Company's interest directly or indirectly relating to his/her responsibility.*
- *Exert his/her best to perform his/her tasks.*
- *Maintain the property and reputation of the Company.*
- *Superiors shall develop and become role model to their subordinates.*

Conflict of Interest

The Company has defined the conflict of interest as a situation where personal interest of the Board of Commissioners, Board of Directors or employees conflicts with the Company's interest. This conflict can involve the interest of service users, any other agencies relevant to BKI service, partners, employees or even members of the community where the Company operates.

The main principles of preventing the conflict of interest are not using a position in the personal interest and/or in the interest of any other relevant persons or parties and avoiding any non official activity that can negatively influence the independence and objectivity in decision making. The activities certainly contravene with position or harm the Company's image and reputation.

Conflict of Interest in Survey / Inspection Results Decision

BKI as a Company giving priority to safety aspect has realized that survey results, reports and certificates so issued shall has an implication to safety aspect required by the relevant parties, among others ship owner, cargo owner, insurance, shipyard, passengers, crew, and the public in the broadest sense of word.

Therefore, the Board of Directors, Heads of Divisions, Heads of Units, Heads of Branches and their Assistants, Heads of Departments, Heads of Fields, Surveyors, Inspectors and technical staff of Head Office have maintained their independence in making decisions, giving recommendations, deciding survey / inspection results, and making reports. In case of conflict of interest, safety aspect shall absolutely become the main priority by referring to the applicable regulation.

Conflict of Interest in Goods / Services procurement Process

Members of Board of Commissioners, Board of Directors and employees shall not participate in any procurement activity involving a Company where the relevant persons or family of the relevant persons have significant shares or certain financial interest in the same.

Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees shall also not demand or receive any money, gift or any other value things, both directly and indirectly, from the competing suppliers nor obtain or reveal any information relating to procurement process and in the contrary.

Pemasok barang atau jasa yang diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan menghindari benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Komisaris, Direksi dan karyawan.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Komisaris, Direksi dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain diluar jam kerja yang telah ditetapkan dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain diluar Perusahaan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Any good or service suppliers invited to participate in a procurement process shall fulfill the requirements to avoid the same conflict of interest as applied to Board of Commissioners, Board of Directors and employees.

Conflict of Interest in Side Activities

Board of Commissioners, Board of Directors and employees are permitted to make any other activities outside the given business hours provided that the activities do not conflict with the Company's interest and/or the activities do not reduce the capability to fulfill the entrusted tasks. The involvement in any other activities outside the Company shall not be prejudice to the independence and objectivity in decision making or influence the effectiveness and punctuality of work completion by the relevant employees.





Perusahaan pada tahun 2007 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 700.000.000,- untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dana tersebut berasal dari penyisihan laba, sebagaimana telah disebutkan dalam keputusan RUPS dan dari pengembalian pinjaman.

Tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah mengembangkan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara BUMN, koperasi dan swasta khususnya pengusaha kecil dan koperasi serta mendorong koperasi dan usaha kecil sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien serta dapat memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya maupun masyarakat di sekitar.

Adapun sasarannya adalah terciptanya kesempatan usaha dan lapangan kerja yang lebih luas bagi usaha kecil dan koperasi sampai ke masyarakat pedesaan, serta terselenggaranya sistem manajemen yang lebih rasional dan efisien yang diikuti dengan peningkatan kemampuan baik permodalan, personil, administrasi, keuangan maupun kemandirian wirausaha. Prioritas pembinaan tahun 2007 kepada usaha kecil baik perorangan maupun badan dan Koperasi (KUD) terutama KUD calon mandiri.

Jumlah realisasi dana yang terdistribusi pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.180.000.000,- yang disalurkan kepada 3 wilayah binaan, yaitu :

Area	Budget (Rp)	Realization (Rp)	Total
DKI Jakarta	300,000,000,-	615,000,000,-	28 Units
DI Yogyakarta	200,000,000,-	290,000,000,-	27 Units
East Java	200,000,000,-	275,000,000,-	13 Units
	700,000,000,-	1,180,000,000,-	68 Units

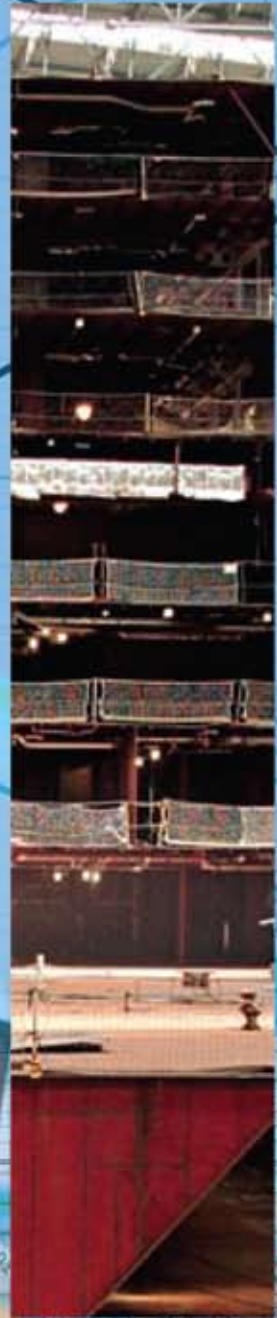
In 2007, the company allocated Rp. 700,000,000,- for Environmental Partnership and Development Program. The fund originates from profit appropriation as already mentioned in resolution of Shareholders Meeting and from loan returns.

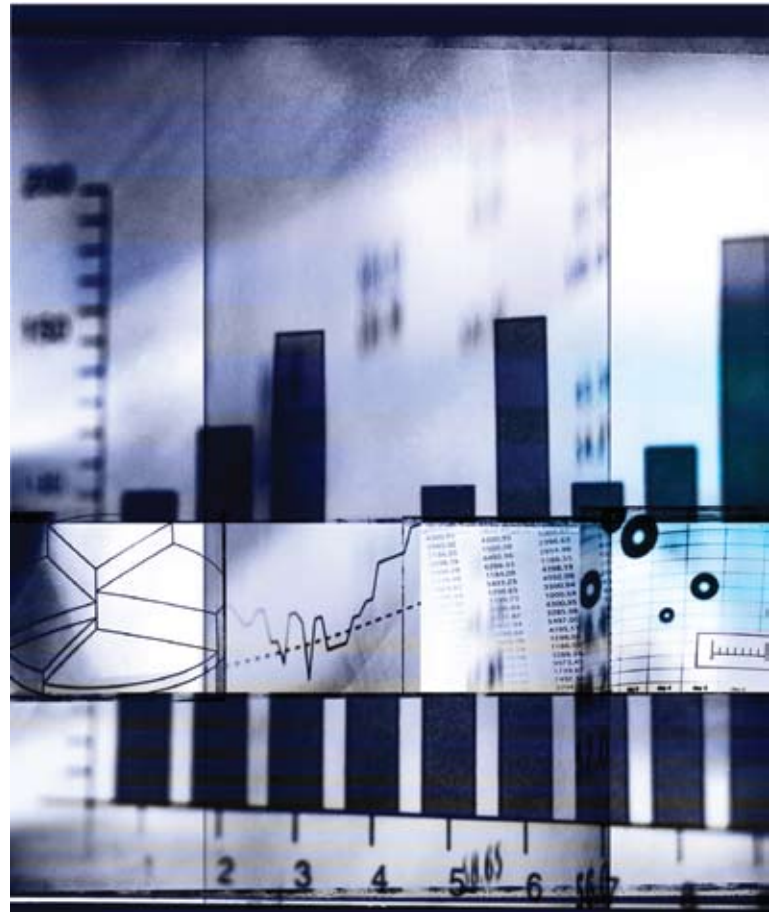
The Environmental Partnership and Development Program is intended to develop and create a sound business climate and maintain the relationship that motivates the growth of mutually supporting conditions between State-Owned Corporations, co-operatives and private parties as well as motivates the cooperatives and small scale business as people's economic institutions to implement, increase and develop their business more effectively and efficiently as well as give the utmost added value and benefit to their members or the community surroundings.

It is also targeted to create wider business and work opportunities to small scale business and cooperatives and rural community, as well as implement more rationale and efficient management system followed by the capability improvement both capitalization, personnel, administration, finance and entrepreneurship independence. 2007 development is given priority to small scale business both individual, entities and cooperatives (Rural Unit Cooperatives) particularly the prospective independent Rural Unit Cooperatives.

Total fund realization in 2007 is Rp. 1,180,000,000,- distributed to 3 developed areas, namely:







Laporan keuangan konsolidasi BKI yang telah diaudit dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendapatan Usaha perusahaan pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 19,69% dibandingkan dengan tahun 2006. Kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan usaha berasal dari pertumbuhan pendapatan segmen Klasifikasi & Statutoria sebesar 20,89% dan pendapatan segmen Konsultasi & Supervisi sebesar 17,84%. Beban Usaha perusahaan pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 20,54% dibandingkan tahun 2006. Pertumbuhan Laba Usaha perusahaan pada tahun 2007 mencapai 15,01%, dibandingkan laba usaha pada tahun 2006. Sehingga Laba Bersih setelah pajak mencapai Rp 16,67 milyar atau tumbuh 14,85% dari laba bersih tahun 2006.

Kondisi kesehatan perusahaan dikategorikan "AAA" (sehat sekali) untuk tahun 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 dan "AA" (sehat) untuk tahun 2002 (audit). Sedangkan untuk tahun 2007 juga dikategorikan "AAA" (sehat sekali) dengan kinerja KPI (Key Performance Indicator) mencapai nilai 103,41. Sebagai BUMN, BKI juga telah menyumbangkan dan berkontribusi kepada negara dalam bentuk dividen dan pajak.

BKI consolidated financial statement already audited in this Annual Report shall be prepared based on the generally applicable Accountancy Principles in Indonesia.

Company's operation income in 2007 grows by 19.69% than in 2006. Classification & Statutory segment contributes to the growth of operation income by 20.89% and Consultancy & Supervision segment by 17.84%. Company operation expenses in 2007 grows by 20.54% than in 2006. Company profit in 2007 grows attains 15.01% than that in 2006. So that, Net profit after taxes achieves Rp 16.67 billion or grows 14.85% than in 2006.

The condition of company health is categorized "AAA" (very healthy) for the year 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 and "AA" (healthy) for the year 2002. While for the year 2007 is also categorized "AAA" (very healthy) with performance KPI (Key Performance Indicator) reaches 103.41 points. As state owned company, BKI has rendered and contribution to the state in the form of dividen and tax.

Summary of Balance Sheet

in million rupiah

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007
I	ASSETS					
1	Current Assets					
	- Cash & Bank	4.639	7.565	9.268	9.924	6.798
	- Accounts Receivable	19.689	19.363	22.884	26.137	37.673
	- Other Current Assets	744	1.823	2.581	4.396	9.294
2	Fixed Assets	16.948	18.740	22.055	29.738	35.923
3	Other Assets	2.721	1.893	1.841	1.864	1.640
	TOTAL ASSETS	44.741	49.384	58.629	72.059	91.330
II	LIABILITIES					
1	Short Term Liability	16.371	14.686	15.618	19.527	26.743
2	Long Term Liability	532	1.356	1.694	1.783	2.232
3	Equity	28.838	33.342	41.317	50.749	62.354
	TOTAL LIABILITIES	44.741	49.384	58.629	72.059	91.330

Summary of Income

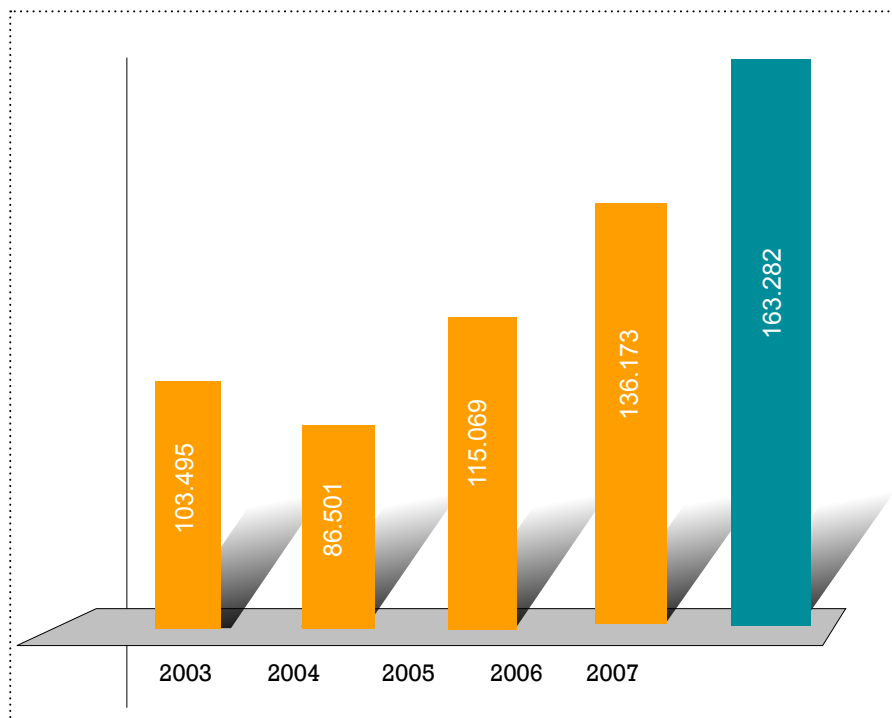
in million rupiah

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007
I	Net Income					
A	Classification	59.422	69.364	72.197	84.251	102.097
B	Consultancy & Supervision	27.079	34.131	42.872	51.922	61.185
	Total (I)	86.501	103.495	115.069	136.173	163.282
II	Operation Expenses					
A	Service Expense	45.741	59.913	68.826	80.998	99.131
B	Marketing Expense	1.572	2.223	2.501	2.826	2.896
C	Administration & Overhead	28.266	16.873	27.299	31.399	36.841
	Total (II)	75.579	89.009	98.626	115.203	138.867
III	Net Operation Income (I-II)	10.922	14.486	16.443	20.970	24.118
IV	Other Incomes (Expenses)	(71)	(1.083)	303	(325)	(204)
V	Profit Before Tax	10.851	13.403	16.746	20.645	23.914
VI	Tax	(3.349)	(3.152)	(4.966)	(6.130)	(7.244)
VII	Profit After Tax	7.502	10.251	11.780	14.515	16.670

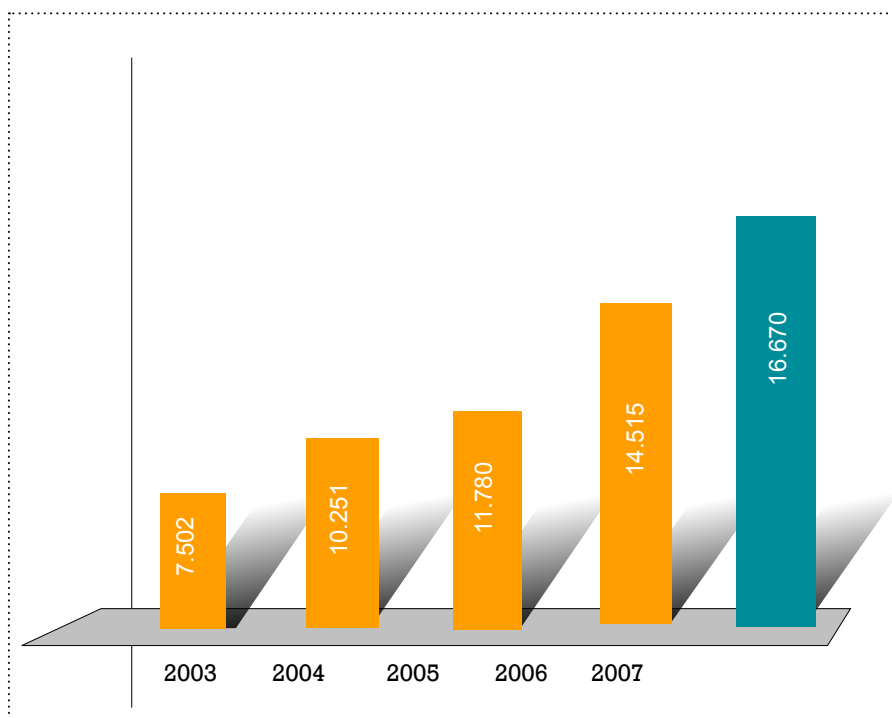
Financial Ratio

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007
I	PROFITABILITY					
	ROA	34.07	29.58	28.56	28.65	26.18
	ROE	27.15	41.11	39.88	40.05	36.78
	Operating Ratio (%)	90.44	86.00	85.71	84.60	85.27
	Net Profit Margin (%)	8.67	9.64	10.24	10.65	10.23
II	ACTIVITY					
	Collection Period (days)	80	68	72	65	71
	Fixed Assets Turnover (x)	5.29	5.52	5.22	5.07	5.11
III	LIQUIDITY					
	Current Ratio	153.15	195.77	222.39	207.18	201.04
	Cash Ratio	28.34	51.51	59.34	50.82	25.42
IV	CAPITALIZATION					
	Total debt/Total Asset (%)	35.45	38.85	29.53	29.57	31.73
	Debt/Equity (%)	58.81	46.01	41.90	41.99	46.47

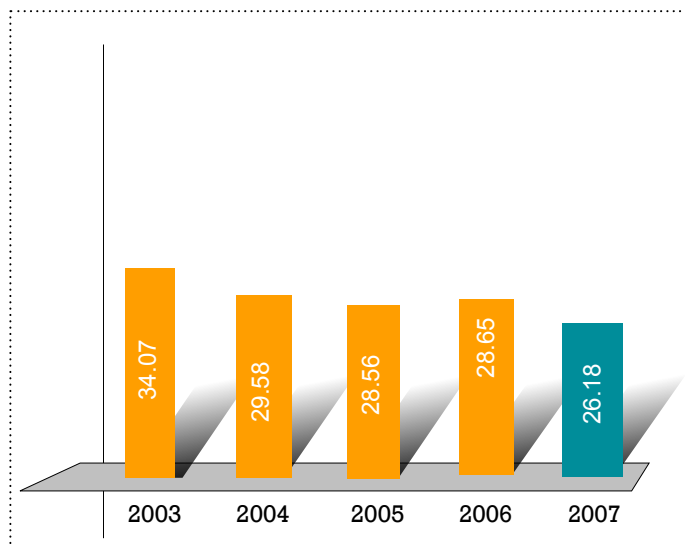
NET REVENUE (2003-2007)
in million rupiah



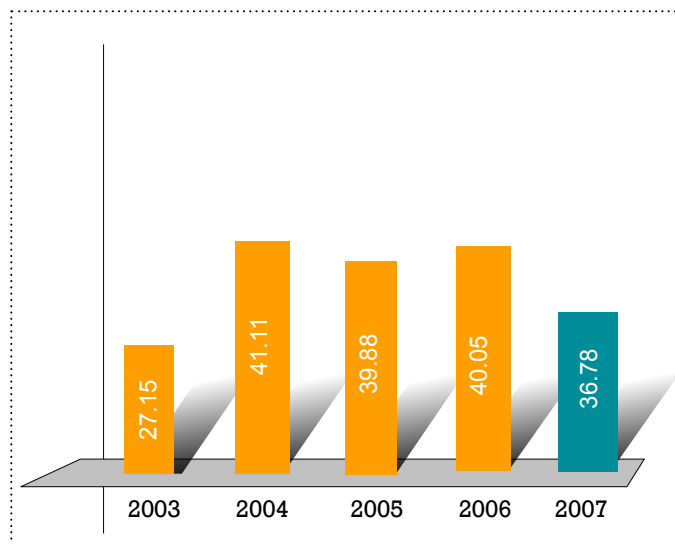
NET PROFIT (2003-2007)
in million rupiah



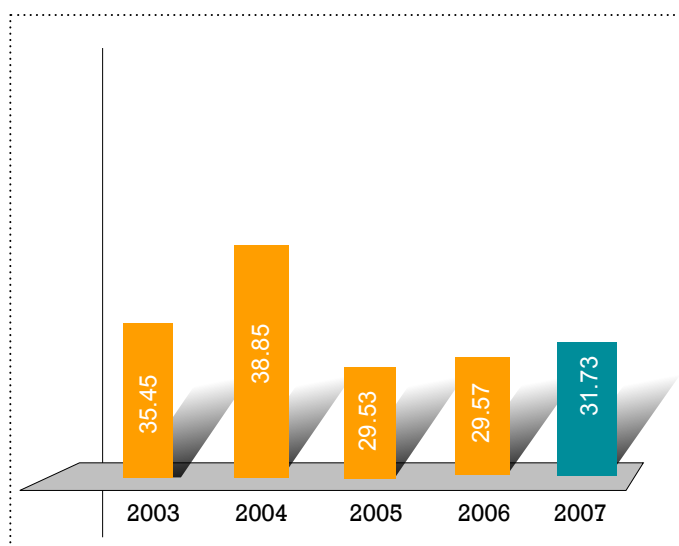
ROA (2003-2007)
%



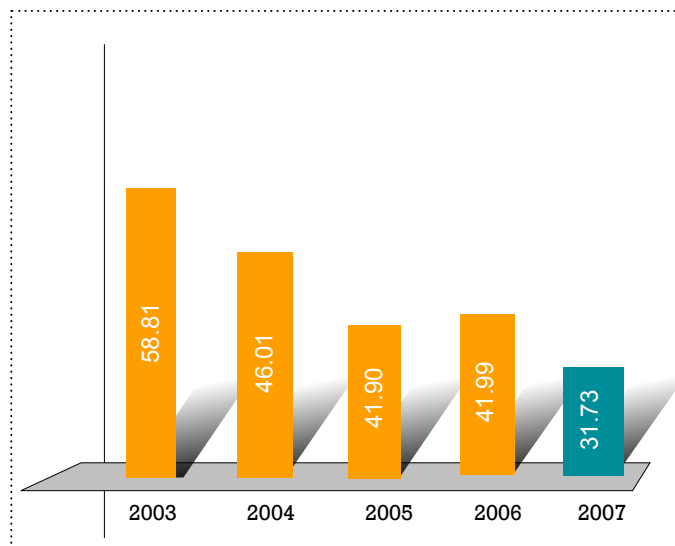
ROE (2003-2007)
%

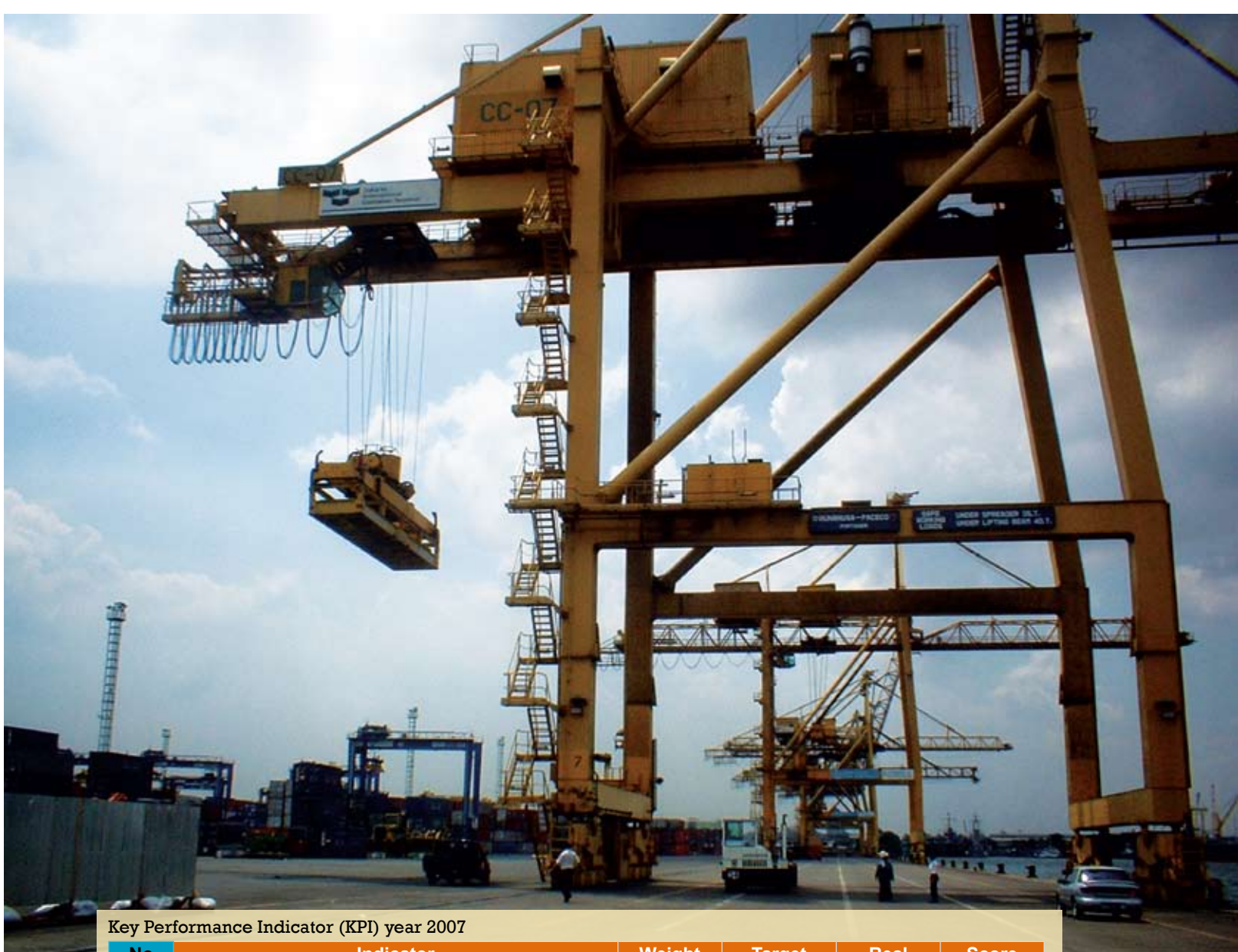


TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET (2003 - 2007)
%



DEBT TO EQUITY RATIO (2003-2007)
%





Key Performance Indicator (KPI) year 2007

No	Indicator	Weight	Target	Real	Score
A.	KPI Operation				
1.	Sales Growth (%)	15	115	120	15,61
2.	Man Power Productivity (million Rp)	10	323	340	10,49
3.	Operation Activities (%)	12,5	170	188	13,85
4.	Ship Register Growth (%)	12,5	4,45	5,55	15,58
	Sub Total KPI Operation	50			55,53
B.	KPI Financial				
1.	EBT (billion Rp)	10,50	22.618	23.914	11,10
2.	Cash Ratio (%)	7	66,52	25,42	2,68
3.	Collecting Period (hari)	7	65	71	6,41
4.	Operating Ratio (%)	10,50	85,90	85,27	10,42
	Sub Total KPI Financial	35			30,61
C.	KPI Dynamics				
1.	Human Development (%)				
	• Total Training Program	3	20	18	2,70
	• Total Trainee	3	146	181	3,72
2.	Research & Development	6	5	6	7,20
3	GCG Assessment Score	3	60	73	3,65
	Sub Total KPI Dynamics	15			17,27
	Total	100			103,41

Board of Commissioner

Chairman	:	Albert Lopian
Commissioner	:	Boediarso Teguh Widodo Achmad Chotibudin

Board of Director

President Director	:	Muchtar Ali
Technical Director	:	Haryanto
Commerce Director	:	Wibisono
Finance & Personnel Director	:	Donny S. Purba

Staff

Head of Planning Unit	:	Saifuddin Wijaya
Head of Internal Control Unit	:	Arsalnan Latief
Head of Quality Assurance Unit	:	Priyo Santosa
Head of R&D Unit	:	Hadi Sutrisno

Technical Staff

Head of Survey Division	:	L. Manupassa
Head of Statutory Division	:	Onot Subagyo
Head of Machinery & Electrical Div.	:	ING. Arimbawa
Head of Hull & Material Division	:	Joeliantoro
Head of Consultation & Supervision Div.	:	Jeffrey B. Massie
Head of Class Admission Dept.	:	Zil Zal H.M.
Head of Class Maintenance Dept.	:	Totok Achmad
Head of Monitoring & Register Dept.	:	M. Rico Faridz
Head of Solas & Marpol Dept.	:	Heru Widodo
Head of Load Line & Cargo Gear Dept.	:	Sri Rachmi Andayani
Head of Machinery Dept.	:	Agus Widjaja
Head of Electrical Dept.	:	Agus Salim
Head of Hull Dept.	:	Soedjarwoko
Head of Welding & Material Dept.	:	Romy Lesmana
Head of Non Class Marketing Dept.	:	A. Bahrin Saad
Head of Control of Non Class Prod. Dept	:	Agung Prihanto

Administration Staff

Head of Finance Division	:	Su'ad Syuhada
Head of Personnel & GA Division	:	Asep Sutrisna S.
Head of Accounting Dept.	:	Herman Yuska
Head of Financial Adm. Dept.	:	R. Sudaryo
Head of Personnel & Training Dept.	:	Nasaruddin
Head of General Affair Dept	:	Koko Kusnadi
Head of Legal & Public Relations Dept.	:	Yuniati
Head of Information System Dept.	:	Diding Suwandi
Head of Program & Budgeting Dept.	:	Taufik Hidayat

Branch Manager

Head of Consultation & Supervision Unit	:	Ajatiman
Head of Ambon Branch Office	:	Alexander Tanggo
Head of Balikpapan Branch Office	:	Yansen Miri
Head of Banjarmasin Branch Office	:	Alfonsus Susilarso
Head of Belawan Branch Office	:	Yunasri Zainal
Head of Batam Branch Office	:	M. Nasrun Djafar
Head of Bitung Branch Office	:	Pieter Petrus Paulus
Head of Cigading Branch Office	:	Edy Sutrisno
Head of Cirebon Branch Office	:	Faried Rahman Rahim
Head of Dumai Branch Office	:	Suwandi
Head of Jambi Branch Office	:	Salvinus Patangke
Head of Kendari Branch Office	:	Sigit Prastowo
Head of Makassar Branch Office	:	Arief Budi Permana
Head of Padang Branch Office	:	Edy Haryanto
Head of Palembang Branch Office	:	Pardy Abbas
Head of Pontianak Branch Office	:	Sugeng Yulianto
Head of Pekanbaru Branch Office	:	Jhoni Rizkal Amza
Head of Semarang Branch Office	:	Mohamad Cholil
Head of Singapore Branch Office	:	Setudju Dangken
Head of Sorong Branch Office	:	Syahrudin Nur
Head of Surabaya Branch Office	:	Darwis Ali
Head of Tanjung Priok Branch Office	:	Muardy Kobandaha

Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I)

The Consultative Committee Of Indonesian Classification

CHAIRMAN :

H. Harijogi

DEPUTY:

Iskendar, MS

SECRETARY:

Hadi Sutrisno

Technical Committee

HEAD:

Eko Panunggal

MEMBERS :

Tjuk Sukardiman
Iskendar, MS
Teguh Sastrodiwongso

Santoso
Samudro
Andy A. Malian

Petrus Paranoan
Naufal Bahreisy
Johnson W. Sutjipto

Imam K. Reksowardojo
Wing Wirjawan
Soegiono

Ferry Andrianz
Amir Gunawan
Amrullah Pase
Firmansyah

Dharma Manullang
Rochim Irawadhy
Muhammad Affandi
M. Moenir

Operational Committee

HEAD:

H. Harijogi

MEMBER :

Joeswanto Karijodimejo

Tjahyo Widono
ING Putu Suryawirawan
Yamin Jinca

Sayogyo Kartoleksono
Bambang Ediyanto
Syahroel Ong

Djoko Tahono
Djoko Mulyanto
Oentoro Surya

Heriyanto
Charles Menaro

Classification

Classification Bureau	Type of Cooperation
American Bureau of Shipping (ABS-USA)	Dual Class
Bureau Veritas (BV-France)	Dual Class
China Classification Society (CCS-China)	Mutual Representative
Det Norske Veritas Classification AS (DnV-Norway)	Dual Class
Germanischer Lloyd (GL-Germany)	Mutual Representative
Hellenic Register of Shipping (HRS-Greece)	Mutual Representative
Indian Register of Shipping (IRS-Indian)	Mutual Representative
International Register of Shipping (IRS)	Mutual Representative
Korean Register of Shipping (KRS)	Mutual Representative
Korean Classification Society DPR of Korea (KCS-DPR of Korea)	Mutual Representative
Lloyd's Register of Shipping (LR-UK)	Dual Class
Nippon Kaiji Kyokai (NK-Japan)	Mutual Representative
Rinave Portuguesa (Portugal)	Mutual Representative
Ships Classification Malaysia (SCM-Malaysia)	Mutual Representative
China Cooperation of Shipping (CCS)	Mutual Representative
Vietnam Register (VR-Vietnam)	Mutual Representative
Italian Register of Shipping (RINA)	Dual Class

Consultancy & Supervision

Organization	Type of Cooperation
Det Norske Veritas (DnV-Norway)	Offshore Services
Korean Register of Shipping (KRS-ROK)	Industrial Inspection
TUV Rheinland (Germany)	Industrial Inspection
TUV Nord (Germany)	Industrial Inspection
Germanischer Lloyd (GL Germany)	Industrial Inspection
PT.ASDP	-Ship Maintenance Supervision -Employee Education & Training
Metal Performance Assessment Group (MPAG)	Engineering Consulting
PT. Dirgantara Indonesia	HRD and Testing Laboratory
Insurance Consortium	Assets Protection Insurance Program
PT. Enggong Sayap Perkasa (ESP)	Inspection & NDT In Oil and Gas Sector

Research & Development

Institution
Technological Development & Application Agency (BPPT)
Centre of Oil and Natural Gas Energy Development (PPT MIGAS)
Office of Technical Materials and Objects Research and Development (B4T)
National Atomic Energy Body (BATAN)
Research Laboratory of ITB (LAPI ITB)
Institute of Technology Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)
University of Hasanuddin (UNHAS)
University of Indonesia (UI)
Indonesian Corrosion Association



Notes:

- ★ : Main Branch
- : Medium Branch
- ▲ : Branch
- : Representative
- : Station

Daftar Kontak

List of Contact

Ambon

Address : Jl. Raya Pelabuhan, Komplek Pelabuhan, Ambon 97126 Indonesia
 Telephone : 62-911-349607, 352745
 Facsimile : 62-911-361105, 352745
 E-mail : bkiab@klasifikasiindonesia.com

Balikpapan

Address : Jl. MT. Haryono No. 8 Ring Road Balikpapan 67111 Indonesia
 Telephone : 62-542-876637, 876641, 876642, 876643
 Facsimile : 62-542-876639, 876645
 E-mail : bkibp@klasifikasiindonesia.com

Banjarmasin

Address : Jl. Skip Lama No. 9 Banjarmasin 70117 Indonesia
 Telephone : 62-511-50175, 58311, 509883
 Facsimile : 62-511-50175
 E-mail : bkibj@klasifikasiindonesia.com

Batam

Address : Jl. Gajah Mada komplek Tiban Indah Mc.Dermott Blok A No. 1, Batam 29421 Indonesia
 Telephone : 62-778-322178, 322083
 Facsimile : 62-778-322118
 E-mail : bkibm@klasifikasiindonesia.com

Belawan

Address : Jl. Veteran No. 218, Belawan 20411 Indonesia
 Telephone : 62-61-6941025, 6941276
 Facsimile : 62-61-6941276
 E-mail : bkibn@klasifikasiindonesia.com

Bitung

Address : Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet, Bitung 95516 Indonesia
 Telephone : 62-438-38720, 38721, 38722
 Facsimile : 62-438-434346
 E-mail : bkibt@klasifikasiindonesia.com

Cigading

Address : Jl. Gerem Raya No. 1 KM 5, Pulo Merak, Cilegon 42438 Indonesia
 Telephone : 62-254-573955, 571007
 Facsimile : 62-254-571007
 E-mail : bkicg@klasifikasiindonesia.com

Cirebon

Address : Jl. Tuparev KM 3, Cirebon 45153 Indonesia
 Telephone : 62-231-205266
 Facsimile : 62-231-205266
 E-mail : bkicn@klasifikasiindonesia.com

Dumai

Address : Jl. Sungai Rokan No. 96, Dumai 28814 Indonesia
 Telephone : 62-765-32574, 35100
 Facsimile : 62-765-31364
 E-mail : bkidm@klasifikasiindonesia.com

Jambi

Address : Jl. Brigjen Katamso No. 62, Kasang, Jambi 36138 Indonesia
 Telephone : 62-741-7555291
 Facsimile : 62-741-7555291
 E-mail : bkijb@klasifikasiindonesia.com

Kendari

Address : Jl. Mayjen Sutoyo No. 97, Tipulu, Kendari 93122 Indonesia
 Telephone : 62-401-321421
 Facsimile : 62-401-322847
 E-mail : bkikd@klasifikasiindonesia.com

Makassar

Address : Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar 90115 Indonesia
 Telephone : 62-411-311993, 315460
 Facsimile : 62-411-315460
 E-mail : bkims@klasifikasiindonesia.com

Padang

Address : Jl. St. Syahrir No. 208, Padang 25216 Indonesia
 Telephone : 62-751-61553, 765436
 Facsimile : 62-751-61553
 E-mail : bkipd@klasifikasiindonesia.com

Palembang

Address : Jl. Perintis Kemerdekaan, 5 Ilir, Palembang 30115 Indonesia
 Telephone : 62-711-713171, 713712, 713680
 Facsimile : 62-711-713173
 E-mail : bkipb@klasifikasiindonesia.com

Pekanbaru

Address : Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok D-4, Pekanbaru 28111 Indonesia
 Telephone : 62-761-854042
 Facsimile : 62-761-854042
 E-mail : bkipn@klasifikasiindonesia.com

Pontianak

Address : Jl. Gusti Hamzah No. 211, Pontianak 78116 Indonesia
 Telephone : 62-561-739579, 743107
 Facsimile : 62-561-739579, 743107
 E-mail : bkipk@klasifikasiindonesia.com

Samarinda

Address : Jl. Manggis No. 4, Samarinda Indonesia
 Telephone : 62-541-734475
 Facsimile : 62-541-734475
 E-mail : bkibp@klasifikasiindonesia.com

Semarang

Address : Jl. M. Pardi No. 5, Pelabuhan Tg. Emas, Semarang 50229 Indonesia
 Telephone : 62-24-3567260, 3543917, 3545805
 Facsimile : 62-24-3543917
 E-mail : bkism@klasifikasiindonesia.com

Singapore

Address : 150 Changi Road #02-01 Aguthrie building – Singapore 419973
 Telephone : 65-68830651, 68830643, 68830634
 Facsimile : 65-63393631
 E-mail : bkisp@klasifikasiindonesia.com

Surabaya

Address : Jl. Kalianget No. 14, Surabaya 60165 Indonesia
 Telephone : 62-31-3295448, 3295449, 3295465, 3295450, 3295451
 Facsimile : 62-31-3294520, 3205451
 E-mail : bkisb@klasifikasiindonesia.com

Sorong

Address : Jl. Jenderal Sudirman No. 140, Sorong 98414 Indonesia
 Telephone : 62-951-322600
 Facsimile : 62-951-323870
 E-mail : bkisr@klasifikasiindonesia.com

Tanjung Priok

Address : Jl. Yos Sudarso 38-39-40, Tanjung Priok, Jakarta 14320 Indonesia
 Telephone : 62-21-43930990, 4300993, 4301017, 4301701
 Facsimile : 62-21-4301702, 43937020
 E-mail : bkitp@klasifikasiindonesia.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Independent Auditor's Report



**Laporan Keuangan
31 Desember
2007 dan 2006**

***Financial Statements
Report December 31,
2006 and 2005***

**Laporan Evaluasi
Kinerja untuk
tahun yang
berakhir pada
31 Desember 2007**

***Performance Evaluation
Report for year ended
December 31, 2007***

Head office:

Jl. Yos Sudarso 38 - 39 - 40 Tanjung Priok, Jakarta - 14320, Indonesia

Phone: (62-21) 4301017, 4301703, 4300993 - fax : (62-21) 43936175

Website : <http://www.klasifikasiindonesia.com>

email : bki@klasifikasiindonesia.com